



~~lowongan
kerja~~

19 JUTA
LAPANGAN
PEKERJAAN

Happy
Birthday

REPUBLIK OLIGARKI

KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA 2026

Media Wahyudi Askar . Galau D Muhammad . Bhima Yudhistira
Isnawati Hidayah . Bakhrul Fikri . Aulia Lianasari . Jaya Darmawan

Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Publikasi

April 2026

Penerbit

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Jakarta, Indonesia

Alamat Surat Elektronik

admin@celios.co.id

Situs Web

www.celios.co.id

Hak Cipta

©2026 CELIOS

CELIOS memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penelitian mengenai ketimpangan ekonomi Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh tim penulis atas dedikasi mereka dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan merumuskan temuan-temuan yang menarik. Apresiasi juga kami berikan kepada semua yang telah memberikan saran konstruktif untuk mendukung argumen dan memperdalam analisis dalam studi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengentasan ketimpangan di Indonesia

Pernyataan Independensi dan konflik kepentingan

Penelitian ini dilakukan secara independen tanpa sponsor, atau intervensi dari pihak manapun. Seluruh proses penelitian dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas dan kaidah ilmiah yang berlaku, serta penulis tidak memiliki konflik kepentingan.

Klaim yang menyatakan bahwa penelitian ini didanai atau dipengaruhi oleh pihak tertentu tidak memiliki dasar empiris yang sah, bersifat tidak akurat, dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum dan Mekanisme Keberatan

Publikasi ini merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan prinsip kebebasan akademik, objektivitas, dan kaidah penelitian yang berlaku serta memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setiap keberatan atas isi penelitian, termasuk terkait penyebutan nama, data, atau kesimpulan analisis, wajib terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme akademik, berupa permintaan klarifikasi, hak jawab, koreksi data, atau penyampaian kontra-analisis akademik yang didukung bukti.

Kutipan

Media Wahyudi Askar, Galau, D. M., Yudhistira, B., Hidayah, I., Fikri, B., Lianasari, A., & Darmawan, J. (2026). Republik oligarki: Ketimpangan ekonomi Indonesia 2026. CELIOS

Penata Desain

Mohammad Arifin
Muhammad Haedar Zhafran Hidayatullah

Laporan dan detail metodologi dapat didownload di:
Kalkulator ketimpangan ekonomi Indonesia dapat diakses di:
tools.celios.co.id/inequality-calculator



Kekayaan 50 orang
terkaya di Indonesia
setara dengan
kekayaan 55 juta
orang Indonesia.

Temuan Utama¹

Kekayaan 50 Triliuner Teratas

Total harta 50 orang superkaya
lebih besar dari APBN

Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia setara
seperlima PDB Indonesia

Harta oligarki **naik Rp13 miliar/hari**,
upah pekerja **hanya naik Rp2 ribu/hari**

Pajak Kekayaan **2% dari 50 orang terkaya**
bisa mengangkat **lebih dari separuh**
penduduk miskin dalam 2 tahun

Pajak Kekayaan 50 Triliuner

93 Triliun

Potensi penerimaan negara dari akumulasi pajak sebesar 2 persen atas kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia

Harta Tak Habis oleh Waktu

603 tahun

Waktu yang dibutuhkan bagi lima triliuner teratas menghabiskan kekayaannya jika masing-masing membelanjakan Rp2 miliar setiap hari.

Lama Kerja Buruh

2,8 Abad

Waktu bekerja yang dibutuhkan buruh untuk menyamai kekayaan 50 triliuner teratas

Dominasi Sektor Ekstraktif

58%

Kekayaan 50 orang terkaya bersumber dari bisnis ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam

Kekayaan 50 orang superkaya

1,4 kali lipat

PDRB gabungan Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali dan Sulawesi

Pajak Kekayaan Seluruh Superkaya

142 Triliun

Potensi penerimaan negara jika seluruh superkaya dengan nilai aset di atas Rp84 Miliar di Indonesia dikenakan pajak kekayaan

Kekayaan Pejabat Publik

Harta Pejabat Publik

Rp30 Triliun

Akumulasi kekayaan Pejabat Publik Kabinet Merah Putih hingga akhir 2024

Pajak Kekayaan Pejabat

Rp752 Miliar

Potensi pajak kekayaan dari Pejabat Eksekutif dan Legislatif

Sentralisasi Kekayaan Kabinet

80%

Kekayaan Kabinet Merah Putih dikuasai oleh 12 pejabat dengan kekayaan di atas Rp1 Triliun

Prabowo Tak Tergapai

2 Abad

Waktu kerja bagi buruh untuk menyamai kekayaan Presiden RI

Jet Pribadi Tak Ramah Emisi

46 Ribu Ton

CO₂e emisi yang dihasilkan oleh jet pribadi superkaya di Indonesia

Gibran Bukan Perintis Biasa

104 tahun

Waktu yang diperlukan generasi muda untuk menyamai kekayaan Gibran Rakabuming Raka

Panglima Kaya Mendahului Prajurit

252 tahun

Waktu tugas bagi seorang tamtama untuk menyamai kekayaan Panglima TNI dengan kenaikan jenjang pangkat dan golongan secara bertahap

Kenaikan Presisi Harta Kapolri

233 tahun

Waktu yang dibutuhkan anggota Polri golongan bawah untuk menyamai kekayaan Kapolri, meski mengalami kenaikan pangkat secara bertahap.

Koalisi Mengamankan Suara Sah Nasional

59%

Suara Sah Nasional yang dapat diamankan dengan afiliasi sembilan Ketua Umum Partai Politik yang menjabat dalam Kabinet Merah Putih

Pajak Kekayaan 50 Triliuner bisa buat apa?

387 ribu

Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat dibangun

21,7 juta

Masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak

1,2 juta

Mahasiswa yang dapat kuliah gratis hingga lulus

41,34 juta ton

Pupuk subsidi yang dapat diberikan kepada petani

**KRL Gratis
8 Tahun
& 40 Moda
Baru**

Selama 8 tahun KRL sepanjang Jabodetabek dapat digratiskan ditambah dengan penambahan 40 rangkaian baru untuk menghilangkan penumpukan penumpang

465 ribu

Penelitian ilmiah yang dapat dibiayai

1,76 GigaWatt

Kapasitas energi nasional yang dapat disuplai dari pembangkit listrik mikrohidro

5,8 juta

Unit panel surya yang dapat disediakan untuk desa terpencil

5,47 juta ha

Hutan hujan tropis yang dapat direstorasi

180 Juta

Warga Penerima Bantuan Iuran BPJS yang dapat ditanggung

13,3 Juta

Total subsidi perawatan kendaraan selama setahun yang akan diterima oleh seluruh pengemudi ojek *online* di Indonesia

4,35 Juta

Nominal gaji bulanan yang akan diterima oleh seluruh guru honorer selama 2 tahun penuh

4,88 juta

Besaran insentif yang didapatkan seluruh tenaga kesehatan di Indonesia

6,1 Juta

Besaran dukungan akses ekonomi bagi disabilitas

34 Juta

Lansia yang mendapatkan perlindungan jaminan hari tua

9,13 juta

Nominal insentif layanan *daycare* yang akan dinikmati oleh seluruh keluarga dengan balita di Indonesia

0 rupiah

Menggratiskan seluruh biaya pengobatan penyakit kronis seperti cuci darah

Tentang Studi Ini

Studi ini kami dedikasikan untuk mereka yang kerap terabaikan, buruh harian yang baru dibayar jika ada pekerjaan, pengemudi *online* yang harus menunggu order berjam-jam, anak muda (gen Z) yang telah menempuh pendidikan namun terhalang dengan sempitnya lapangan kerja. Juga untuk perempuan dengan beban berlapis, para pensiunan tanpa perlindungan sosial dan para pejuang KRL yang berdesakan setiap hari dalam layanan transportasi publik yang belum layak, meski telah membayar pajak.

Studi ini juga diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tidak pernah merayakan ulang tahun, karena sejak awal, hidup mereka lebih tentang bertahan daripada merayakan.

Ini merupakan studi kedua CELIOS mengenai ketimpangan ekonomi sejak studi tahun 2024. Alih-alih membaik, data terbaru justru menunjukkan tren ketimpangan yang semakin dalam. Laporan ini tidak dimaksudkan menjadi sekedar ornamen akademik, melainkan juga sebagai refleksi sosial bahwa dalamnya ketimpangan bukanlah takdir, tetapi terakumulasi secara sistematis dan direproduksi lintas generasi. Anak yang lahir dari keluarga miskin tidak hanya mewarisi keterbatasan ekonomi, tetapi juga menanggung warisan struktural terbatasnya akses pendidikan, kesehatan dan mobilitas sosial.

Studi ini tidak disusun secara instan, tapi melalui proses diskusi dan pengumpulan data yang panjang, dengan kontribusi dari berbagai ahli. Ditengah lanskap kebijakan Indonesia yang dipenuhi retorika politis, pendekatan berbasis data adalah satu-satunya pijakan kredibel untuk membaca persoalan secara jernih. Kami berharap temuan dalam laporan ini tidak hanya didiskusikan di warung kopi atau di ruang kelas di kampus-kampus. Lebih penting lagi, data ini didiskusikan di dalam kantor pemerintah, di dalam rapat kabinet, dan dicari jalan keluarnya.

Kami mengharapkan agar setiap temuan dalam studi ini ditelaah secara jernih dan rasional. Dalam konteks ini, respon pengelola negara acapkali

bergerak di antara normatif dan defensif. Kritik terhadap ketimpangan sering diposisikan sebagai serangan terhadap stabilitas, sementara pengamat yang mengangkat isu ini dilabeli berlebihan dan dianggap punya kepentingan terselubung. Sikap semacam ini justru menyingkap persoalan yang lebih mendasar, bahwa ketimpangan tidak hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga kontrol atas pengetahuan.

Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi cermin bagi arah kebijakan saat ini. Tidak semua kebijakan nasional berjalan netral terhadap ketimpangan. Proyek besar seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, misalnya, berpotensi menimbulkan dampak distribusional yang tidak merata apabila tidak dirancang dan dikelola dengan cermat.

Yang pasti, pilihan-pilihan kebijakan hari ini, yang berada di tangan mereka yang memegang otoritas, akan membentuk ruang hidup generasi mendatang. Keinginan anak muda Indonesia itu sederhana. Mereka hanya menginginkan kepastian bahwa usaha masih sepadan dengan hasil, dan bahwa negeri ini tidak dikontrol ordal dan kepentingan segelintir oligarki.

Media Wahyudi Askar, Ph.D

Mewakili para penulis

Daftar Isi

Mengapa Ketimpangan Ekonomi Penting Dipahami

	1
Metodologi	3
Tujuan Penelitian	3

2. Oligarki: Mesin Penghancur Masa Depan Generasi Muda

Mengapa dalam sistem oligarki, generasi muda justru menjadi kelompok yang paling terjepit?	27
Generasi muda bekerja dengan minim perlindungan dan jaminan	30
Apakah Meritokrasi Masih dianggap Penting di Indonesia	33
Kapan Generasi Muda Punya Rumah	34

5. Militer Dibalik Oligarki

Ketimpangan Insentif sebagai Akar Keterlibatan Militer dalam Bisnis	52
---	----

6. Partai Oligarki

1. Ketimpangan Ekonomi 2026

1.1 Siapa Segelintir Elite Bisnis yang Mengakumulasi Kekayaan di Indonesia?	5
1.2 Siapa Elite Pejabat Publik Terkaya di Indonesia?	12
1.2.1 Pejabat Publik Eksekutif	12
1.2.2 Pejabat Publik Legislatif	16
1.3 Bagaimana Oligarki Memperparah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia	20
1.4 Pada Saat yang Sama, Kelas Menengah Bawah Terjepit Secara Ekonomi	24

3. Pengemudi Ojek Online dan Wajah Nyata Ketimpangan Ekonomi Modern

4. Dari Ketimpangan ke Ketidakberdayaan: Perempuan dalam Sistem Oligarkis

Perempuan Bertahan Hidup dari Ketidakadilan Ekonomi	44
Sistem yang Dibentuk Oligarki Semakin Mencekik Perempuan	46

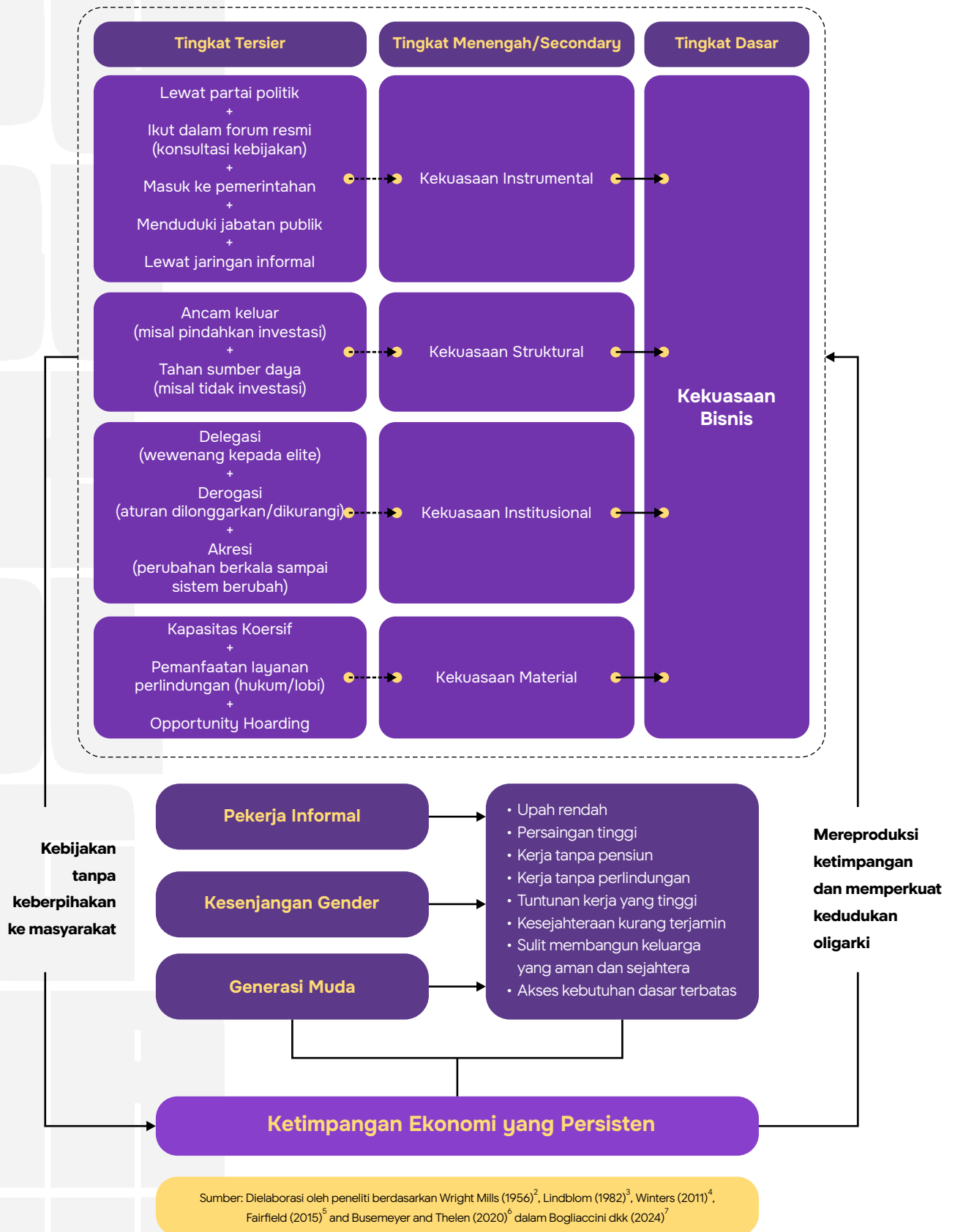
7. Rekomendasi

A. Reformasi Fiskal Progresif dan Akuntabel	62
7.1 Penerapan Pajak Kekayaan	62
7.2 Penerapan <i>Tax Benefit</i> untuk Mendukung Ekonomi Kelas Menengah	67
7.3 Menghapus Pajak yang Membebani Kelas Menengah Bawah	68
7.4 Transparansi Data Pajak Individu di Indonesia	69
B. Memutus Siklus:	
Ketika Oligarki Menentukan Arah	71
7.5 Partai Politik Dibiayai Publik	71
7.6 Reset Ulang Skema Bagi Hasil Daerah Lewat Mekanisme Dividen Sosial	72
7.7 Audit Anggaran Negara	73

Mengapa Ketimpangan Ekonomi Penting Dipahami

Ketimpangan ekonomi di Indonesia makin terlihat jelas. Kekayaan dan akses sumber daya banyak dikuasai oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sulit meningkatkan taraf hidupnya (lihat Gambar 1). Kondisi ini tidak hanya memengaruhi distribusi kesejahteraan, tetapi juga membatasi peluang hidup sehari-hari, terutama bagi pekerja informal, perempuan, dan generasi muda. Karena itu, penting bagi generasi muda terdampak (yang kelak menjadi generasi penerus pengambil kebijakan) untuk memahami akar masalah dan arah perubahan yang diperlukan.

Gambar 1. Framework Oligarki dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia



Metodologi

Studi ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif⁸. Data dikumpulkan melalui analisis data sekunder yang bersumber dari statistik resmi, laporan lembaga internasional, data Forbes, serta berbagai sumber yang kredibel. Data yang dianalisis meliputi distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, tingkat kemiskinan, dan indikator ekonomi lainnya. Penelitian ini berfokus pada dua kelompok utama, yaitu daftar 50 orang terkaya di Indonesia menurut Forbes serta data kekayaan para pejabat negara di level eksekutif dan legislatif.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan, serta menganalisis bagaimana dominasi elit (*elite capture*)⁹ membentuk struktur oligarki yang mempengaruhi kebijakan publik dan memperkuat ketimpangan di Indonesia. Studi ini juga melihat sejauh mana fenomena tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.



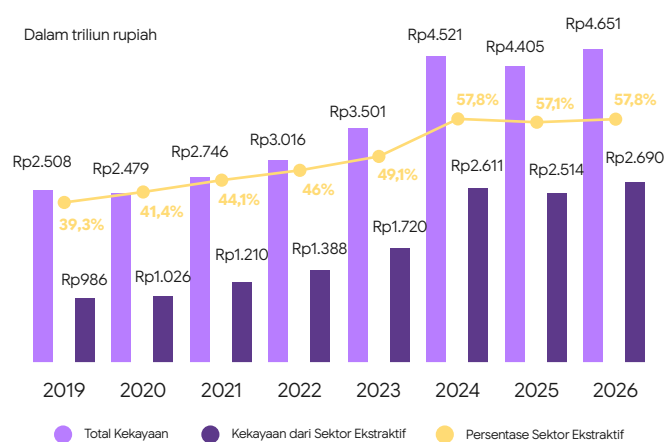
1 Ketimpangan Ekonomi 2026

Perdebatan mengenai ketimpangan ekonomi semakin sering muncul dalam diskursus publik di Indonesia, baik di dalam ruang rapat pejabat hingga obrolan warung kopi. Di satu sisi, perwakilan pemerintah selalu berseloroh bahwa ekonomi Indonesia tumbuh pesat dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas lima persen¹⁰. Padahal, pengukuran progres pembangunan berbasis angka pertumbuhan ini sudah lama ditinggalkan dalam diskursus ekonomi modern karena mengabaikan dimensi paling penting dari pembangunan, yaitu siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertumbuhan tersebut¹¹. Cara berpikir ini masih sering diulang oleh beberapa ekonom *boomers* yang tidak memiliki *sense* keadilan dalam melihat distribusi hasil pembangunan.

1.1 Siapa Segelintir Elite Bisnis yang Mengakumulasi Kekayaan di Indonesia?

Salah satu cara paling mudah dalam melihat redistribusi ekonomi¹² adalah dengan membandingkan perubahan distribusi kekayaan di kelompok paling atas dan paling bawah dalam struktur ekonomi¹³.

Gambar 3. Total Kekayaan 50 Triliuner di Indonesia



Sumber: Data Forbes 50 orang terkaya di Indonesia (2026), diolah oleh peneliti

Gambar 3 menunjukkan bahwa dalam periode 2019–2025 kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun. Gambar 3 menunjukkan bahwa kekayaan beberapa orang superkaya bisa bertambah ribuan triliun hanya dalam waktu singkat. Hal ini memunculkan pertanyaan sederhana soal bagaimana mekanisme redistribusi ekonomi Indonesia dan siapa yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi.

Pada periode 2019 hingga 2022, kontribusi sektor energi dan ekstraktif terhadap total kekayaan berada di angka 39–46% (lihat Gambar 3). Hingga pada tahun 2026, proporsi harta 50 orang super kaya yang berasal dari sektor ekstraktif melonjak mencapai 57,8%. Artinya, para oligarki terus menumpuk kekayaan dari keuntungan besar, di mana lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya Indonesia berasal dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, sawit, dan nikel.

57 jet pribadi milik superkaya Indonesia menghasilkan 46.170 ton CO₂e per tahun, setara dengan emisi 7.825 mobil dan 51.993 motor. Para oligarki ini menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan dan krisis iklim di Indonesia²¹

Tabel 1.

Peningkatan Kekayaan Orang Superkaya di Indonesia Sepanjang Tahun 2016-2026



**Haryanto
Tjiptodihardjo**

2026 CAGR¹⁴
Rp84,40 T 71%



**Marina
Budiman**

2026 CAGR
Rp113,09 T 47,9%



**Lim Hariyanto
Wijaya Sarwono**

2026 CAGR
Rp108,03 T 42,2%



**Han Arming
Hanafia**

2026 CAGR
Rp74,27 T 41,4%



**Otto Toto
Sugiri**

2026 CAGR
Rp158,66 T 40,7%



**Low Tuck
Kwong**

2026 CAGR
Rp340,96 T 38,4%



**Sjamsul
Nursalim**

2026 CAGR
Rp47,26 T 36,5%



**Prajogo
Pangestu**

2026 CAGR
Rp482,74 T 36,0%



**Manoj
Punjabi**

2026 CAGR
Rp55,70 T 31,5%



**Wijono & Hermanto
Tanoko keluarga**

2026 CAGR
Rp50,64 T 27,4%



Tahiro & keluarga

2026 CAGR
Rp178,92 T 18,1%



**Widjaja
keluarga**

2026 CAGR
Rp477,68 T 16,7%



**Jogi Hendra
Atmadja & keluarga**

2026 CAGR
Rp59,08 T 15,2%



**Hamami
& keluarga**

2026 CAGR
Rp28,69 T 14,5%



Sulisty & keluarga

2026 CAGR
Rp24,47 T 13,2%



**Sukanto
Tanoto**

2026 CAGR
Rp72,58 T 12,7%



**Arini Subianto
& keluarga**

2026 CAGR
Rp40,51 T 12,7%



**Martua
Sitorus**

2026 CAGR
Rp60,76 T 12,6%



**Theodore
Rachmat**

2026 CAGR
Rp75,96 T 12,4%



**Anthony Salim
& keluarga**

2026 CAGR
Rp221,11 T 8,7%



**R, Budi &
Michael Hartono**

2026 CAGR
Rp649,84 T 8,5%



**Irwan Hidayat
& keluarga**

2026 CAGR
Rp19,41 T 8,1%



**Peter
Sondakh**

2026 CAGR
Rp64,14 T 7,8%



**Sri Prakash
Lohia**

2026 CAGR
Rp145,16 T 7,4%



**Bambang
Sutantio**

2026 CAGR
Rp35,45 T 7,0%



**Djoko
Susanto**

2026 CAGR
Rp42,20 T 6,8%



**Garibaldi Thohir
& keluarga**

2026 CAGR
Rp64,14 T 4,8%



**Putera Sampoerna
& keluarga**

2026 CAGR
Rp42,20 T 3,3%



**Ciputra
keluarga**

2026 CAGR
Rp27,01 T 3,0%



**Agoes
Projosasmito**

2026 CAGR
Rp99,59 T 3,0%



**Bachtiar & Burhan,
Bahari Karim
& keluarga**

2026 CAGR
Rp70,89 T 2,8%



**Alexander
Ramlie**

2026 CAGR
Rp45,57 T 2,6%



**Husodo Angkosubroto
& keluarga**

2026 CAGR
Rp25,32 T 2,3%

<p>34</p>  <p>Hilmi Panigoro & keluarga 2026 CAGR Rp48,95 T 1,2%</p>	<p>35</p>  <p>Ciliandra* & Wirastuty Fangiono keluarga 2026 CAGR Rp25,32 T 0,7%</p>	<p>36</p>  <p>Mochtar Riady & keluarga 2026 CAGR Rp37,13 T 0,5%</p>	<p>37</p>  <p>Chairul Tanjung 2026 CAGR Rp82,71 T 0,0%</p>	<p>38</p>  <p>Hary Tanoesoedibjo 2026 CAGR Rp18,57 T 0,0%</p>
<p>39</p>  <p>Jenny Quantero & Engki Wibowo 2026 CAGR Rp24,97 T -0,5%</p>	<p>40</p>  <p>Soegiarto Adikoesoemo 2026 CAGR Rp21,94 T -0,7%</p>	<p>41</p>  <p>Husain Djojonegoro & keluarga 2026 CAGR Rp15,53 T -0,8%</p>	<p>42</p>  <p>Eddy Sugianto 2026 CAGR Rp18,57 T -2,9%</p>	<p>43</p>  <p>Lim Chai Hock 2026 CAGR Rp21,94 T -3,6%</p>
<p>44</p>  <p>Hartati Murdaya Family 2026 CAGR Rp21,10 T -4,1%</p>	<p>45</p>  <p>Dewi Kam 2026 CAGR Rp60,76 T -5,0%</p>	<p>46</p>  <p>Eddy Katuari & keluarga 2026 CAGR Rp16,79 T -5,2%</p>	<p>47</p>  <p>Setiawan & keluarga 2026 CAGR Rp60,76 T -5,8%</p>	<p>48</p>  <p>Susilo Wonowidjojo & keluarga 2026 CAGR Rp54,01 T -7,7%</p>
<p>49</p>  <p>Eddy Kushnadi Sariaatmadja & keluarga 2026 CAGR Rp18,57 T -8,1%</p>	<p>50</p>  <p>Edwin Soeryadjana & keluarga 2026 CAGR Rp16,88 T -9,6%</p>	<p>50 orang terkaya Indonesia, yang secara statistik sebesar 0,000000174% dari populasi menguasai kekayaan milik 18,6% rakyat Indonesia.</p>		

Sumber: Data Forbes 50 orang terkaya 2026, diolah oleh peneliti¹⁵

CAGR: Compound Annual Growth Rate (Rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan)

Peringkat orang terkaya di Indonesia masih ditempati oleh Keluarga Hartono dengan kekayaan sebesar Rp650 triliun (lihat Tabel 1). Sementara Prajogo Pangestu menempati posisi kedua dengan kekayaan Rp483 triliun. Selanjutnya disusul keluarga Widjaja (Rp478 triliun), Low Tuck Kwong (Rp341 triliun), Anthony Salim (Rp221 triliun), dan keluarga Tahir (Rp179 triliun).

Berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR), kekayaan Haryanto Tjiptodihardjo tumbuh paling cepat hingga mencapai 71%. Disusul Marina Budiman dengan peningkatan kekayaan 47,9%, dan Lim Hariyanto Wijaya Sarwono meningkat sebesar 42,2%. Gambar 4 menunjukkan bahwa 34% kekayaan 50 superkaya di Indonesia berasal dari sektor energi dan ekstraktif. Selain kekayaan mereka yang bersumber dari aktivitas yang mengeksploitasi sumber daya alam, gaya hidup mereka juga sarat akan kerusakan lingkungan.

Gambar 4. Sektor Ekstraktif sebagai Sumber Kekayaan Elite

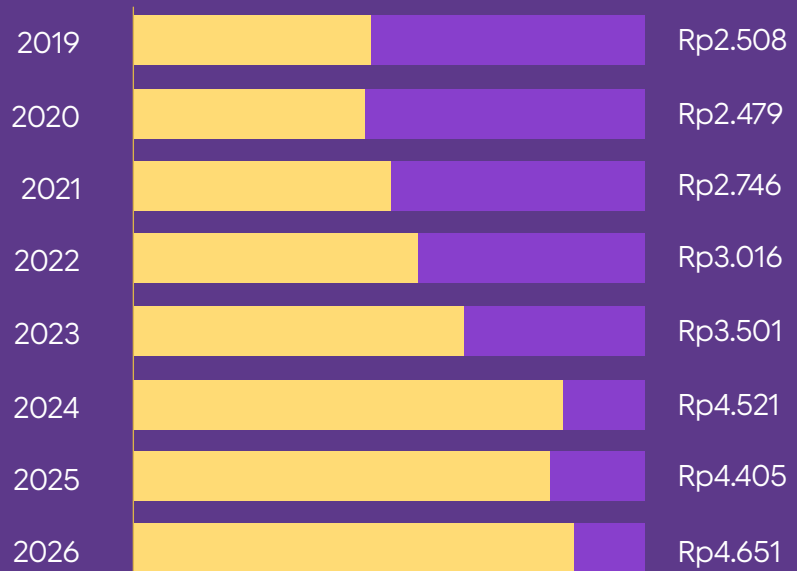


Dominasi Sektor Ekstraktif
Kekayaan 50 orang terkaya bersumber dari bisnis ekstraktif yang mengeksplorasi sumber daya alam

Tanpa perubahan struktur ekonomi dan politik, pada tahun 2050,

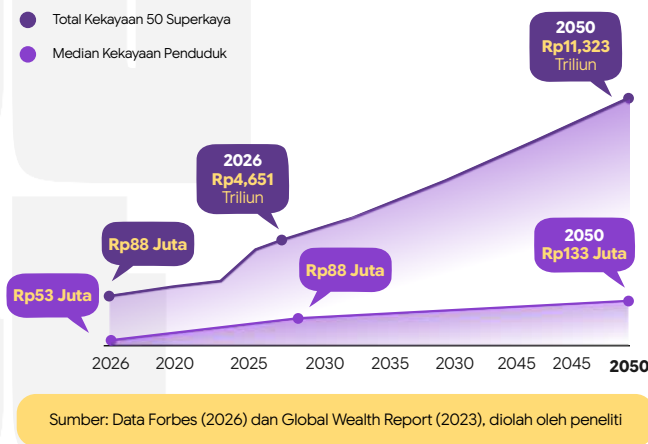
50 orang terkaya di Indonesia akan punya kekayaan setara 111 juta penduduk Indonesia

Total Kekayaan 50 Triliuner di Indonesia (2019-2026)
(dalam triliun rupiah)



Sumber: Data Forbes (2026), diolah oleh peneliti

Gambar 2. Proyeksi Median Kekayaan Superkaya dibandingkan Penduduk

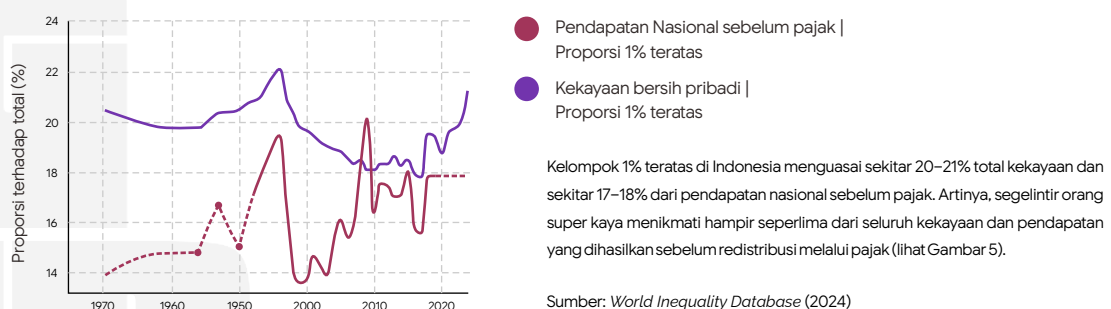


Median kekayaan 50 orang superkaya di Indonesia pada 2026 mencapai Rp52,3 miliar, sementara median kekayaan penduduk hanya Rp84,35 juta. Ke depan, kesenjangannya makin lebar (lihat Gambar 2). Pada 2050, kekayaan median superkaya diproyeksikan melonjak 106% menjadi Rp107,7 triliun. Sebaliknya, median kekayaan penduduk hanya naik 20% menjadi Rp101 juta.

Sektor ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam ini menghasilkan keuntungan besar bagi segelintir kelompok Superkaya. Sementara itu, biaya tambahan akibat kerusakan lingkungan justru ditanggung oleh masyarakat. Bencana banjir yang melanda Sumatera pada Desember 2025, di wilayah dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam intensif, menjadi contoh nyata bagaimana dampak tersebut dirasakan langsung oleh warga¹⁶. Per Maret 2026, bahkan banyak korban yang masih berada di pengungsian¹⁷.

Sektor ekonomi berbasis ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam memperkaya segelintir elite, sementara masyarakat menanggung bencana, dan bahkan dibiarkan tanpa bantuan yang layak.

Gambar 5. Ketimpangan Pendapatan dan Kekayaan, Indonesia, 1965-2024



Gambar 6 menunjukkan betapa ekstremnya ketimpangan kekayaan di Indonesia, di mana para triliuner di Indonesia jauh melampaui superkaya dari berbagai negara lain. Budi & keluarga Hartono mencatat kekayaan sekitar Rp650 triliun, jauh di atas tokoh global seperti Pham Nhat Vuong (Vietnam) Rp468 triliun atau Jay Y. Lee (Korea Selatan) Rp456 triliun. Bahkan Prajogo Pangestu (Rp483 triliun) dan Widjaja Family (Rp478 triliun) masih lebih kaya dibanding hampir seluruh nama dalam daftar lintas negara tersebut.

Gambar 6.

Superkaya di Indonesia dibandingkan Triliuner Terkaya Berbagai Negara (dalam triliun rupiah)¹⁸



Sumber: Data FORBES (2026), diolah oleh peneliti

“

Di negeri yang sebagian masyarakat masih bergulat dengan “hari ini makan apa”, segelintir orang bisa lebih kaya dari ‘sultan’ Timur Tengah



Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia bertambah



Sementara rerata upah buruh di Indonesia hanya meningkat



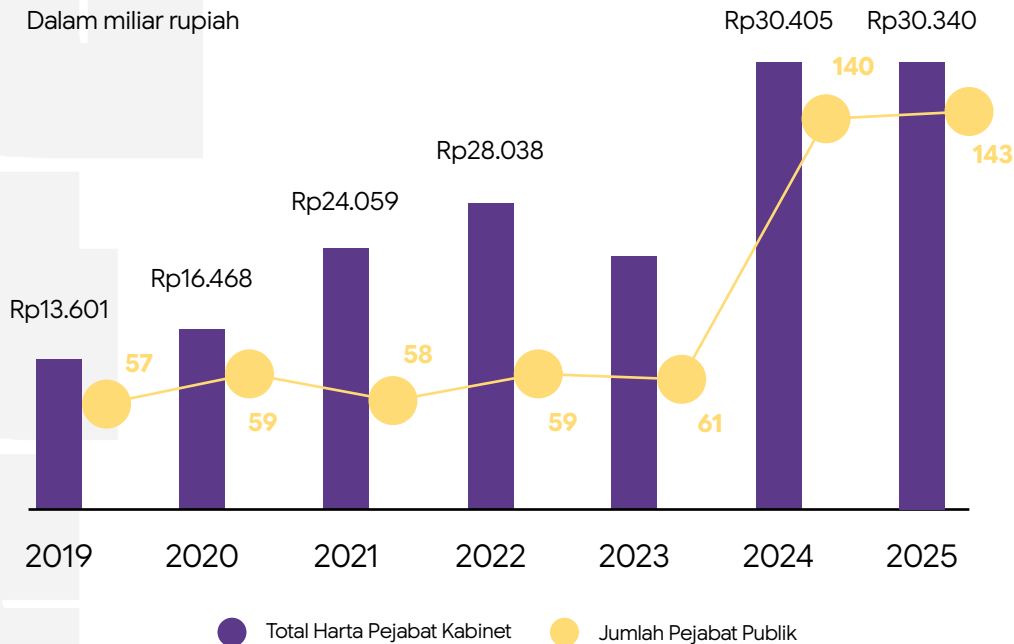
1.2 Siapa Elite Pejabat Publik Terkaya di Indonesia?

Ketimpangan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari pengusaha besar, karena kekayaan sering berjalan bersamaan dengan kekuasaan politik. Banyak elit politik yang juga bagian dari lingkaran orang kaya, atau setidaknya memungkinkan mereka membuat kebijakan yang menguntungkan bagi mereka dan kelompoknya.

1.2.1 Pejabat Publik Eksekutif

Kekayaan kumulatif pejabat publik dalam Kabinet Merah Putih mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat hanya dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan di puncak struktur ekonomi tak hanya dinikmati oleh pelaku bisnis swasta melainkan tampak juga dalam struktur kekuasaan politik.

Gambar 7. Total Harta Pejabat Publik Kabinet (2019-2025)¹⁹



Sumber: Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (2026), diolah oleh peneliti

Gambar 7 menunjukkan perkembangan total harta pejabat publik dalam kabinet pemerintahan di Indonesia sepanjang periode 2019–2025. Keterbatasan rentang waktu analisis dikarenakan ketidakpatuhan pejabat negara dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN secara berkala. Hanya 73 dari 143 Pejabat publik dalam kabinet Merah Putih yang sudah memperbarui pelaporan LHKPN. Urgensi transparansi aset pejabat negara semakin besar di tengah tren peningkatan kekayaan pejabat publik. Dalam perspektif ekonomi politik, lonjakan kekayaan pejabat publik seperti ini penting dicermati karena berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan, jaringan ekonomi, dan posisi strategis dalam negara.

Rakyat butuh kerja
selama **2 Abad** untuk menyamai
kekayaan Prabowo Subianto

Gambar 8.**Klasemen Pejabat Publik Terkaya Kabinet Merah Putih per 2025**
(dalam miliar rupiah)

- 1 
Widiyanti Putri Wardhana
Menteri Pariwisata
Rp5.435,83
- 2 
Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan
Rp2.440,11
- 3 
Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Rp2.414,31
- 4 
Prabowo Subianto
Presiden RI
Rp2.062,24
- 5 
Maruarar Sirait
Menteri Perumahan dan Permukiman
Rp1.554
- 6 
Otto Hasibuan
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi, dan Pemasaran
Rp1.526,31
- 7 
Setiawan Ichlas
Bidang Ekonomi dan Perbankan
Rp1.518,77
- 8 
Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Rp1.509,13
- 9 
Amran Sulaiman
Menteri Pertanian
Rp1.382,90
- 10 
Muhamad Mardiono
Bidang Ketahanan Pangan
Rp1.151,19
- 11 
Raffi Farid Ahmad
Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Serbi
Rp1.034
- 12 
Rosan Perkasa Roeslani
Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia
Rp864,65
- 13 
Purnomo Yugiantoro
Bidang Energi
Rp464,47
- 14 
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Rp436,97
- 15 
Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Rp337,31
- 16 
Ario Bimo Nandito Ariotedjo
Menteri Pemuda dan Olahraga
Rp292,20
- 17 
Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasaran
Rp269,05
- 18 
Muhammad Qodari
Wakil Kepala Staf Kepresidenan
Rp261,94
- 19 
Silmy Karim
Wakil Menteri Migrasi dan Pemasaran
Rp234,60
- 20 
Rachmat Pambudy
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Rp222,42
- 21 
Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan
Rp221,46
- 22 
Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perindustrian
Rp198,65
- 23 
Wiranto
Bidang Politik dan Keamanan
Rp193,30
- 24 
Todotua Berry Panigori Pasaribu
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Rp175,62
- 25 
Diaz Faisal Malik Hendropriyono
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Rp169,54
- 26 
Aris Marsudiyanto
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus
Rp158,86
- 27 
Terawan Agus Putranto
Bidang Kesehatan
Rp147,52
- 28 
Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Kepala BP Badan Usaha Milik Negara
Rp138,40
- 29 
Suahasil Nazara
Wakil Menteri Keuangan
Rp138,17
- 30 
Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilajahan
Rp117,19



Sumber: LHKP (2025)

Gambar 8 menunjukkan bahwa pejabat publik terkaya di Kabinet Merah Putih didominasi oleh kelompok triliuner, dengan Widiyanti Putri Wardhana (Rp5,4 triliun) posisi teratas, diikuti Sakti Wahyu Trenggono (Rp2,44 Triliun), Erick Thohir (Rp2,41 Triliun) dan Prabowo Subianto (Rp2 Triliun) yang masing-masing memiliki kekayaan di atas Rp2 triliun. Sejumlah nama lain seperti Maruarar Sirait (Rp1,55 triliun), Otto Hasibuan (Rp1,53 Triliun), dan Setiawan Ichlas (Rp1,52 Triliun) juga berada dalam kelompok dengan kekayaan di atas satu triliun rupiah. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan adanya konsentrasi kekayaan di dalam struktur pemerintahan, mencerminkan fenomena *elite consolidation*²⁰, di mana kekayaan dan kekuasaan saling menguatkan dalam satu kelompok yang sama.

Total kekayaan pejabat publik yang dihitung berdasarkan LHKPN belum tentu merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Instrumen ini masih menyisakan kemungkinan adanya aset yang tidak dilaporkan, baik secara sengaja maupun tidak. Dengan demikian, angka yang tercantum berpotensi lebih mencerminkan batas minimum, sementara kekayaan riil yang dimiliki pejabat ini dapat jauh lebih besar dari yang dilaporkan.

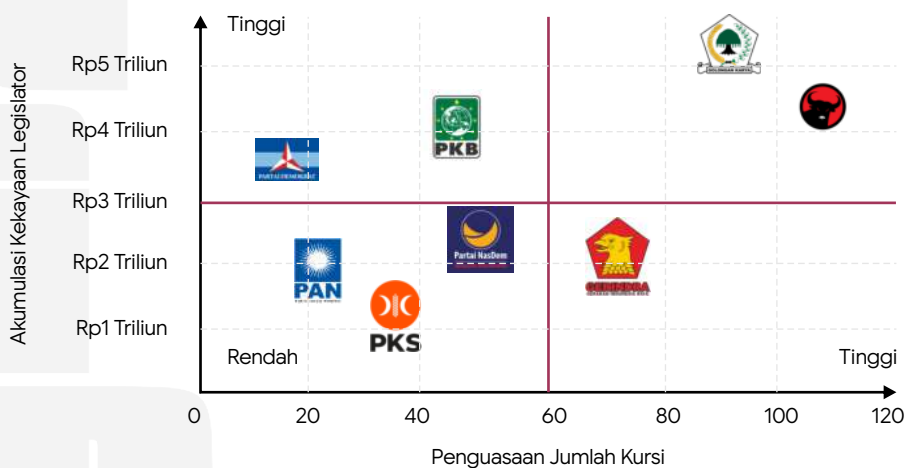
1.2.2 Pejabat Publik Legislatif

Konsolidasi elit tidak hanya terjadi di level eksekutif tetapi juga pada ranah legislatif. Dalam sistem politik dengan biaya elektoral tinggi seperti di Indonesia, partai membutuhkan pendanaan besar, membuka ruang bagi keterlibatan elite ekonomi (lihat Gambar 1). Hubungan ini pasti bersifat timbal balik: partai memperoleh dukungan finansial, sementara pemilik kekayaan mendapatkan akses langsung ke kekuasaan. Keterlibatan ini juga menjadi bentuk investasi politik untuk melindungi kepentingan ekonomi, dengan memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan strategis seperti regulasi bisnis, pajak, dan pengelolaan sumber daya. Jadi, terdapat pertemuan elite ekonomi, politik, dan partai dalam satu lingkaran kekuasaan yang saling menguatkan.

Gambar 9 menyiratkan pola yang sangat jelas dimana partai dengan penguasaan kursi besar cenderung juga diisi oleh legislator dengan kekayaan tinggi. Artinya, kekuatan politik (kursi) berjalan seiring dengan kekuatan finansial (kekayaan kandidat).

Persoalan ini melahirkan implikasi serius dalam demokrasi di Indonesia. Untuk memenangkan pemilu dan menguasai kursi dalam jumlah besar, partai membutuhkan, atau bahkan bergantung pada calon legislator yang kaya raya. Biaya politik yang tinggi (kampanye, logistik, mobilisasi suara, hingga jejaring patronase) membuat kontestasi elektoral tidak netral secara ekonomi. Akibatnya, akses menuju kemenangan semakin ditentukan oleh kapasitas finansial kandidat, bukan semata kualitas representasi.

Gambar 9. Peta Partai Politik Berbasis Jumlah Kursi dan Konsentrasi Kekayaan



Sumber: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 2025, diolah oleh peneliti

Kalau kursi di Senayan lebih ditentukan isi rekening daripada isi kepala, jangan heran kalau anak muda cerdas dan orang baik yang tidak punya uang cuma jadi penonton. Bukan karena kalah kualitas, tapi karena tidak mampu 'bayar tiket masuk' ke arena politik

Tabel 2 menunjukkan bahwa total kekayaan 578 anggota DPR mencapai sekitar Rp26,7 triliun, dengan rata-rata sekitar Rp46 miliar per legislator. Namun kekayaan tersebut tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada sejumlah figur tertentu di setiap partai. Secara agregat, Golkar memiliki total kekayaan legislator terbesar sekitar Rp5,8 triliun, disusul PDIP (Rp5,10 triliun) dan PKB (Rp4,14 triliun). Beberapa figur menonjol sebagai legislator terkaya di partainya adalah, seperti Sihar Sitorus (PDIP) dengan sekitar Rp871 miliar, Haeny Relawati Rini Widyastuti (Golkar) sekitar Rp470 miliar, serta Rusdi Kirana (PKB) yang menjadi legislator terkaya di DPR dengan sekitar Rp2,60 triliun dan Fathi (Demokrat) dengan sekitar Rp1,72 triliun.

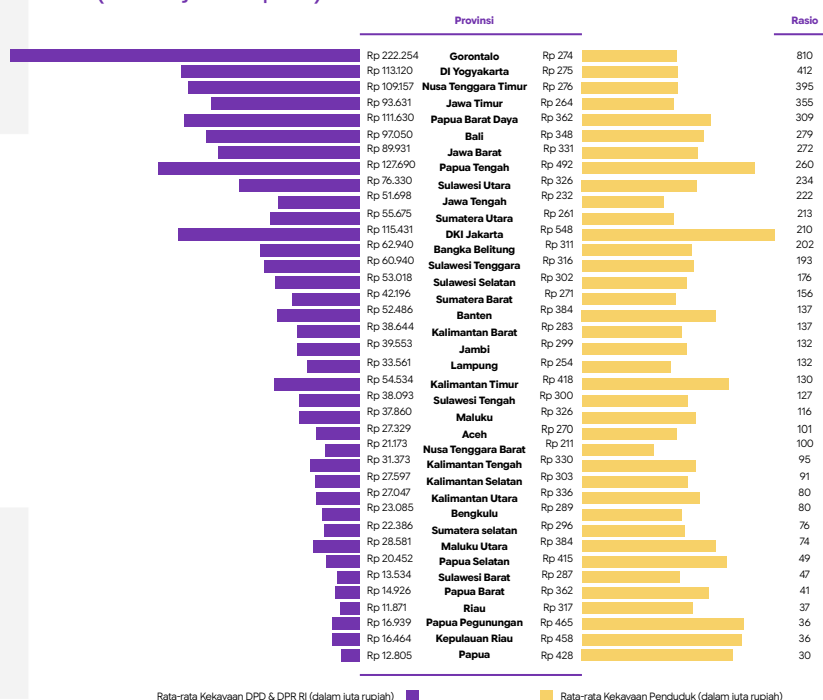
Tabel 2. Kekayaan Anggota DPR RI berdasarkan Fraksi Partai Politik

	Total Kekayaan Legislator Rp5.884.397.902.323	Rata-rata kekayaan Rp57130.076.722	Jumlah Kursi 101		Hj. Haeny Relawati R.W. Rp470.566.738.515
	Total Kekayaan Legislator Rp5.104.144.416.030	Rata-rata kekayaan Rp47.260.596.445	Jumlah Kursi 110		Sihar P.H. Sitorus Rp871.188.628.449
	Total Kekayaan Legislator Rp4.177.373.698.914	Rata-rata kekayaan Rp564.267.287.676	Jumlah Kursi 68		Rusdi Kirana Rp2.603.426.732.731
	Total Kekayaan Legislator Rp3.124.236.656.352	Rata-rata kekayaan Rp71.005.378.553	Jumlah Kursi 44		H. Fathi Rp1.729.450.074.142
	Total Kekayaan Legislator Rp3.058.526.596.624	Rata-rata kekayaan Rp44.978.332.303	Jumlah Kursi 69		Rachmat Gobel Rp451.555.266.195
	Total Kekayaan Legislator Rp2.902.273.741.524	Rata-rata kekayaan Rp33.747.369.087	Jumlah Kursi 86		Siti Hediati Soeharto Rp709.567.168.702
	Total Kekayaan Legislator Rp930.570.268.834	Rata-rata kekayaan Rp17.557.929.601	Jumlah Kursi 53		Hj. Ledia Hanifa A. Rp139.040.533.516
	Total Kekayaan Legislator Rp1.475.844.455.183	Rata-rata kekayaan Rp30.746.759.483	Jumlah Kursi 48		H. Eddy Soeparno Rp249.312.085.502

Sumber: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (2026), diolah oleh peneliti

Gambar 10 menunjukkan jurang yang nyaris tidak masuk akal antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili. Contoh ekstrem di Provinsi Gorontalo misalnya, rata-rata kekayaan penduduk hanya sekitar Rp274 juta, sementara rata-rata kekayaan anggota DPR dan DPD RI dari dapil ini mencapai Rp222 miliar. Artinya, wakil rakyat di sana 810 kali lebih kaya dari rakyatnya sendiri. Pola yang parah juga terjadi di DI Yogyakarta dengan rasio 421 kali lipat, disusul Nusa Tenggara Timur sebesar 395 kali lipat, Jawa Timur sebesar 355 kali lipat, dan Papua Barat Daya sebesar 309 kali lipat.

Gambar 10. Perbandingan Rata-Rata Kekayaan Antara Elit dan Masyarakat Umum (dalam juta rupiah)



Rata-rata Kekayaan DPR & DPD RI (dalam juta rupiah) Rata-rata Kekayaan Penduduk (dalam juta rupiah)

Sumber: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 2025, diolah oleh peneliti

Jika kita lihat di hampir semua provinsi, polanya sama, kekayaan wakil rakyat ratusan kali lipat dibanding masyarakat yang mereka wakili. Artinya, mereka yang duduk di parlemen bukan representasi rakyat biasa, tapi representasi kelas super kaya.

Temuan ini memang tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran hukum, namun mencerminkan struktur elite di Indonesia. Ketika pengambil kebijakan didominasi oleh kelompok ekonomi yang sangat mapan, muncul pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Jarak sosial-ekonomi yang lebar ini sejatinya juga menjelaskan mengapa banyak pejabat publik yang tidak memiliki empati, atau bahkan cenderung meremehkan persoalan yang dihadapi masyarakat kecil. Ini terjadi karena posisi ekonomi mereka yang memang terlalu jauh dari realitas mayoritas masyarakat dan tidak mengetahui dan merasakan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat kecil.

“





















Sedihnya, gedung senayan menjadi markas klub miliarder yang “menyewa” demokrasi. Ketika wakil rakyat 810 kali lebih kaya dari rakyat yang diwakilinya, mereka tidak lagi memahami kehidupan rakyat, tapi hanya mengatur tanpa merasakan



1.3 Bagaimana Oligarki Memperparah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

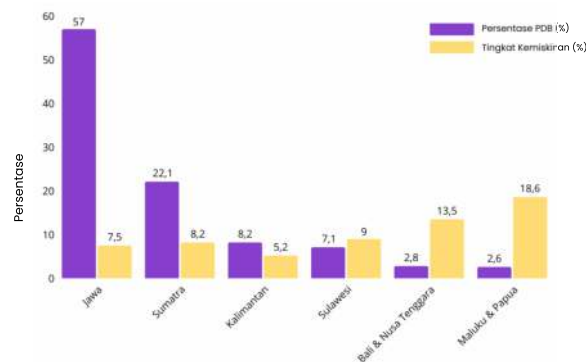
Oligarki menjadi akar dari ketimpangan yang ada di Indonesia. Tabel 5 menunjukkan profil oligarki Indonesia dan lokasi usahanya. Faktanya, sumber daya alam dikeruk dari Kalimantan, Sumatra, NTB, hingga Papua, dimana hutan dibabat, tanah dilubangi, dan ruang hidup masyarakat lokal dikorbankan, akan tetapi, pusat kendali, aliran keuntungan, dan kehidupan para elite justru terkonsentrasi di Jakarta sebagian kota di Pulau Jawa. Para superkaya tersebut, membangun kekayaan dari daerah, tapi tidak hidup dengan konsekuensinya. Mereka tidak menghirup debunya, tidak menanggung kerusakan lingkungannya, dan tidak merasakan dampak hancurnya ekonomi lokal pasca-ekstraksi. Selain itu, aktivitas ekonomi yang oligarki lakukan di daerah tersebut tidak serta merta mensejahterakan masyarakatnya.

Profil Elite Bisnis: Basis, Lokasi Operasi, dan Sektor

 Budi & Michael Hartono	Basis (Domisil/Perusahaan) Kudus & Jakarta (Djarum, BCA)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Kudus (rokok), nasional (BCA)	Sektor Perbankan, rokok	 Dewi Kam	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Kalimantan (pembangkit listrik)	Sektor Energi
 Prajogo Pangestu	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Barito Pacific)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Banten (petrokimia), Kalimantan	Sektor Energi, petrokimia	 Martua Sitorus	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Wilmar)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Sumatra & Kalimantan	Sektor Sawit
 Low Tuck Kwong	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Bagan Resources)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Kalimantan Timur	Sektor Batu bara	 Sukanto Tanoto	Basis (Domisil/Perusahaan) Singapura / RGE	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Riau (APRIL), Sumatra	Sektor Pulp, sawit
 Anthoni Salim	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Salim Group)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Nasional (Indofood)	Sektor Konsumer	 Chairul Tanjung	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (CT Corp)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Nasional	Sektor Diversifikasi
 Sri Prakash Lohia	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Indorama)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Purwakarta (Jawa Barat)	Sektor Petrokimia	 Theodore Rachmat	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Triputra)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Kalimantan, Sumatra	Sektor Agribisnis
 Otto Toto Sugiri	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (DCI Indonesia)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Cikarang (data center)	Sektor Teknologi	 Bachtiar Karim	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Musim Mas)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Sumatra (Medan, Riau)	Sektor Sawit
 Tahir	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Mayapada Group)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Jakarta (bank, RS)	Sektor Keuangan	 Cilandra Fargiono	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (First Resources)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Kalimantan & Riau	Sektor Sawit
 Widjaja keluarga	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Sinar Mas)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Riau, Sumatra Selatan	Sektor Sawit, pulp	 Hilmi Panigoro	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Medco)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Natuna, Papua, Timur	Sektor Energi
 Agoes Projosasmito	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Amman Mineral)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) NTB (Batu Hijau)	Sektor Tambang	 Arini Subianto	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Persada Capital)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Kalimantan (tambang)	Sektor Energi
 Garibaldi Thohir	Basis (Domisil/Perusahaan) Jakarta (Adaro)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Kalimantan Selatan	Sektor Batu bara	 Susilo Wonowidjojo	Basis (Domisil/Perusahaan) Kediri (Gudang Garam)	Lokasi Operasi (yang TERVERIFIKASI) Kediri, Jawa Timur	Sektor Rokok

Fakta menunjukkan bahwa banyak wilayah di luar Jawa kaya akan sumber daya alam, dari tambang hingga energi, namun nilai tambah ekonominya tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal (lihat Gambar 11). Hasilnya, daerah yang menyuplai sumber daya bagi pertumbuhan nasional justru tetap menjadi wilayah dengan kemiskinan tinggi dan akses pembangunan terbatas. Hal ini semakin diperparah dengan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 yang memperdalam ketimpangan regional.

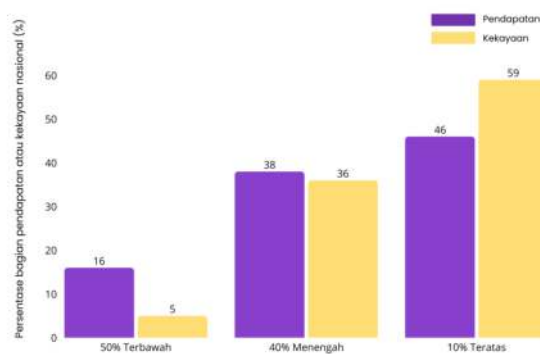
Gambar 11. Ketimpangan dan Kemiskinan Regional di Indonesia berdasarkan Pulau



Sumber: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 2025, diolah oleh peneliti

Oligarki dengan leluasa menimbun aset-aset yang mereka memiliki tanpa perlu khawatir dengan pembangunan ekonomi daerah dan perputaran ekonomi lokal, karena itu bukan agenda utama mereka. Gambar 12 memperlihatkan ketimpangan yang sangat ekstrem, terutama ketika dilihat dari sisi aset yang orang kaya miliki. Setengah populasi Indonesia hanya memiliki 5% total aset, sedangkan 10% teratas menguasai 59%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat hampir tidak memiliki kepemilikan nyata dalam ekonomi dan hanya bergantung pada pendapatan, sementara kelompok atas bukan hanya berpenghasilan besar tetapi juga menguasai sumber-sumber kekayaan yang terus berkembang.

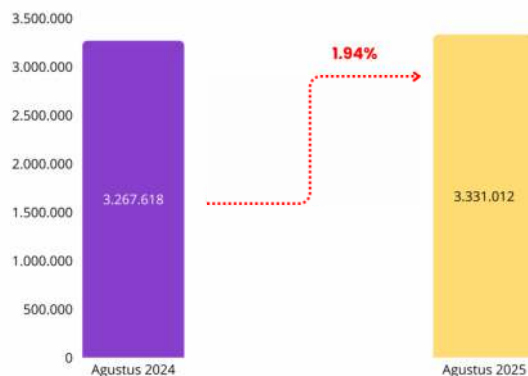
Gambar 12. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan di Indonesia



Sumber: World Inequality Database 2019, diolah oleh peneliti

Aset bisa diwariskan, menghasilkan keuntungan berulang (bunga, dividen, sewa). Sistem ekonomi hari ini, memungkinkan mereka terus memperkuat posisi ekonomi tanpa harus bekerja lebih keras. Regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, mendorong fleksibilitas pasar kerja, tapi dalam praktiknya menekan pekerja, upah ditekan lebih murah, outsourcing meluas, dan perlindungan kerja melemah. Rata-rata upah buruh nasional hanya meningkat sekitar 1,94 persen dalam satu tahun, angka yang tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan lonjakan kekayaan kelompok paling kaya (Gambar 13).

Gambar 13. Peningkatan Rata-Rata Upah Buruh Nasional

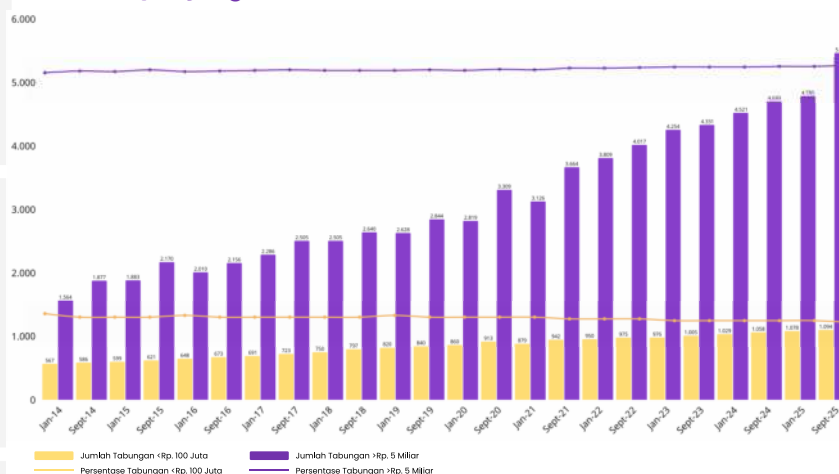


Sumber: Sakernas (Agustus 2024 & 2025), diolah oleh peneliti

Ekonomi bisa saja tumbuh di atas 5 persen, tapi kalau ekonomi hanya dinikmati segelintir orang saja, namanya bukan pertumbuhan, tapi kemunduran ekonomi yang dipoles angka.

Ketimpangan ekonomi riil sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sederhananya masyarakat bisa melihat saldo tabungan yang mereka miliki saat ini dan bandingkan dengan tren yang ditunjukkan pada Gambar 14. Kami menemukan bahwa tabungan kelompok kaya tumbuh lebih cepat dibandingkan masyarakat kecil. Simpanan jumbo di atas Rp5 miliar kian mendominasi 56,45% dari total uang di bank. Padahal, hampir seluruh nasabah di Indonesia (sekitar 98,91%) merupakan mereka yang saldonya di bawah Rp100 juta (lihat Gambar 14).

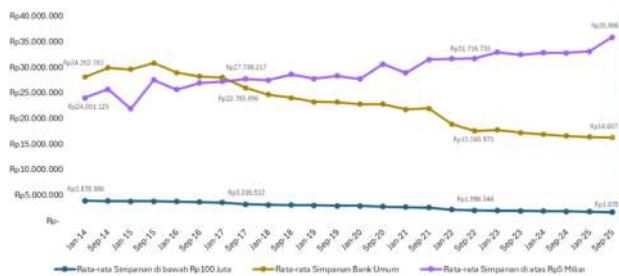
Gambar 14. Simpanan Bank Umum Berdasarkan Jumlah Nominal Sepanjang 2014-2025



Sumber: Data Distribusi Simpanan Bank Umum 2014-2025, diolah oleh peneliti

Gambar 14 menunjukkan pergeseran signifikan dalam struktur simpanan perbankan yang semakin didominasi oleh kelompok nasabah dengan dana besar sepanjang 2014–2025. Nilai simpanan di atas Rp5 miliar meningkat tajam dari Rp1.564 triliun menjadi Rp5.463 triliun. Disamping peningkatan nominal tabungan, proporsi dibandingkan total simpanan juga meningkat dari 43% menjadi 56%. Namun tren ini berbeda pada simpanan di bawah Rp100 juta. Meskipun nominal tabungan meningkat dari Rp567 triliun menjadi Rp1.094 triliun. Namun, proporsinya justru turun dari 16% menjadi 11%. Artinya, kontribusi nasabah dengan tabungan kecil relatif mengecil dalam struktur total simpanan.

Gambar 15. Rata-rata Simpanan Bank Umum Berdasarkan Nominal Tabungan Sepanjang 2014-2025



Sumber: Data Distribusi Simpanan Bank Umum 2014-2025, diolah oleh peneliti

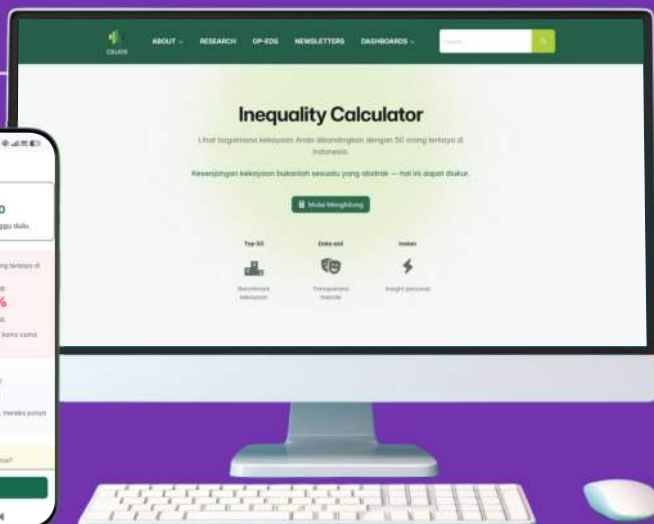
Rata-rata simpanan di atas Rp5 miliar menunjukkan tren meningkat cukup kuat, dari sekitar Rp24 juta per rekening pada 2014 menjadi sekitar Rp35,8 juta pada 2025. Sebaliknya, rata-rata simpanan di bawah Rp100 juta justru mengalami penurunan, dari sekitar Rp3,87 juta menjadi sekitar Rp1,67 juta dalam periode yang sama (lihat Gambar 15).

Mau kah kamu tahu?

Ingin memahami ketimpangan dengan lebih mudah? Tim peneliti menyediakan simulasi kalkulator ketimpangan yang membantu menjelaskan bagaimana fenomena ketimpangan terjadi secara lebih sederhana. Cek selengkapnya di website celios.co.id

Kalkulator Ketimpangan

Scan untuk menggunakan



1.4 Pada Saat yang Sama, Kelas Menengah Bawah Terjepit Secara Ekonomi

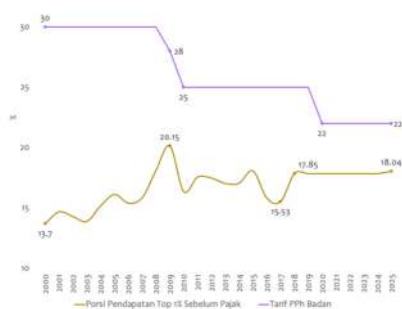
Ketika kekayaan semakin terkonsentrasi pada kelompok kecil, baik di kalangan elite bisnis maupun elite politik, kelompok masyarakat dengan sumber daya terbatas justru lebih rentan terhadap dampak kebijakan fiskal negara.

Hal ini terlihat jelas dalam konteks utang negara yang terus meningkat. Jika total utang pemerintah dibagi dengan jumlah penduduk, setiap warga secara implisit menanggung sekitar Rp33,8 juta. Meskipun tidak dibayar secara langsung oleh individu, utang tersebut pada akhirnya dilunasi melalui pajak, inflasi, atau pengurangan belanja sosial. Dalam praktiknya, beban ini sering lebih terasa bagi masyarakat miskin karena sebagian besar pendapatan mereka sudah habis untuk kebutuhan dasar, dan masih harus menanggung beban pajak seperti pajak konsumsi, pajak kendaraan dan beragam pajak daerah.

Situasi menjadi lebih problematis ketika utang digunakan untuk membiayai proyek yang manfaatnya tidak dinikmati secara merata, seperti proyek kereta cepat Whoosh, yang lebih banyak menguntungkan wilayah kelompok elit, sementara masyarakat miskin, terutama di luar Jawa, tetap ikut menanggung konsekuensi fiskalnya tanpa memperoleh manfaatnya sama sekali.

Disisi lain, para triliuner menikmati beragam insentif dari pemerintah lewat berbagai diskon pajak. Gambar 15 menunjukkan fakta tarif PPh badan terus dipangkas dari sekitar 30% menjadi 22%, negara secara sadar memberi “diskon” kepada korporasi. Pada saat yang sama porsi pendapatan kelompok 1% terkaya justru terus meningkat karena menikmati secara tidak langsung pengurangan pajak tersebut. Dengan kata lain, kebijakan fiskal yang seharusnya menjadi alat redistribusi justru bekerja berlawanan arah. Negara mengurangi beban pajak bagi pemilik modal, sementara ketimpangan semakin dalam karena kenaikan pendapatan terbesar dinikmati oleh segelintir orang superkaya.

Gambar 16. Proporsi pendapatan 1% teratas vs PPh badan terhadap PDB di Indonesia, 2000–2025



Sumber: WID.world (2025); Kemenkeu (2025); BPS (2025); dan Trading Economics (2025), diolah oleh CELIOS

“

Beragam wujud perilaku menyebarkan ada di setiap lapisan masyarakat. Namun yang paling jauh, ketika melihat penguasa menyanjung daya juang si Miskin tanpa benar-benar menyembuhkan luka perih dalam hidupnya

2

Oligarki: Mesin Penghancur Masa Depan Generasi Muda

“

Generasi muda perlu kerja keras hingga **104 Tahun** untuk mengejar kekayaan Gibran Rakabuming Raka saat ini!

Mengapa dalam Sistem Oligarki, Generasi Muda Justru Menjadi Kelompok yang Paling Terjepit?

Oligarki membangun sistem yang secara sistematis mempersempit masa depan generasi muda (lihat Gambar 17). Ketika peluang kerja dan sumber daya terkonsentrasi pada segelintir elite, jumlah kesempatan yang tersedia bagi generasi muda menjadi terbatas. Kalaupun ada kesempatan kerja, upah yang ditawarkan tetap rendah. Upah yang mereka terima habis hanya untuk bertahan hidup, bahkan sering kali harus menanggung orang tua dan saudara. Siklus ini terus berulang tanpa jeda. Bahkan saat mereka membangun keluarga sendiri, mereka tidak benar-benar lepas, melainkan masuk ke tekanan baru sebagai bagian dari sandwich generation.

Generasi muda hari ini dipaksa bekerja berlapis, delapan jam kerja utama, ditambah part-time dan freelance, bukan untuk naik kelas, tapi sekadar bertahan hidup dan berharap bisa mengumpulkan sedikit aset. Akibatnya, banyak yang bahkan takut memulai hidup (seperti: menikah atau membangun keluarga) karena belum punya jaminan ekonomi yang layak

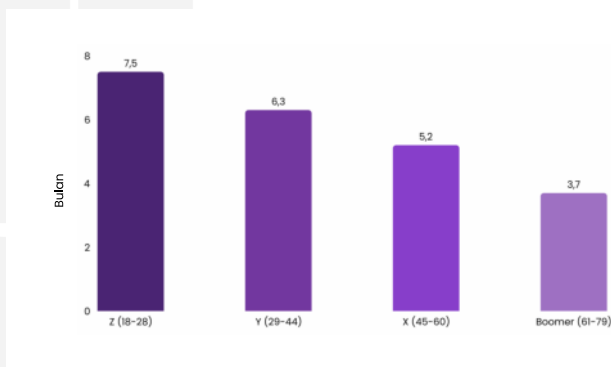
Gambar 17. Generasi Muda yang Terhimpit Sistem Oligarki



Gen Z harus menganggur hingga 7,5 bulan sebelum bisa mendapatkan pekerjaan (lihat Gambar 18). Karena waktu tunggu kerja panjang dan persaingan ketat, 7,8 juta Gen Z terpaksa bekerja di sektor kasar. Mereka tidak punya pilihan. Harus menerima pekerjaan kasar untuk bertahan, sembari berharap datangnya pekerjaan yang layak (lihat Gambar 19).

Gambar 18.

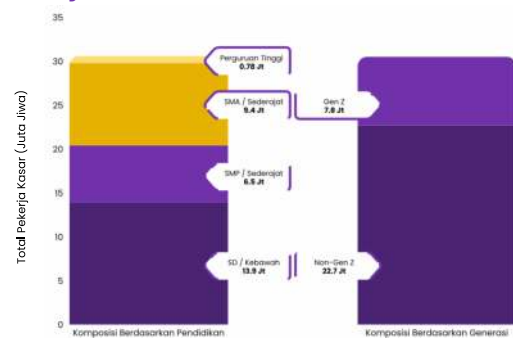
Gen Z Paling Lama Menganggur



Sumber: Sakernas Agustus (2025); diolah oleh peneliti

Gambar 19.

Lulusan Sarjana dan Gen Z menjadi Pekerja Kasar

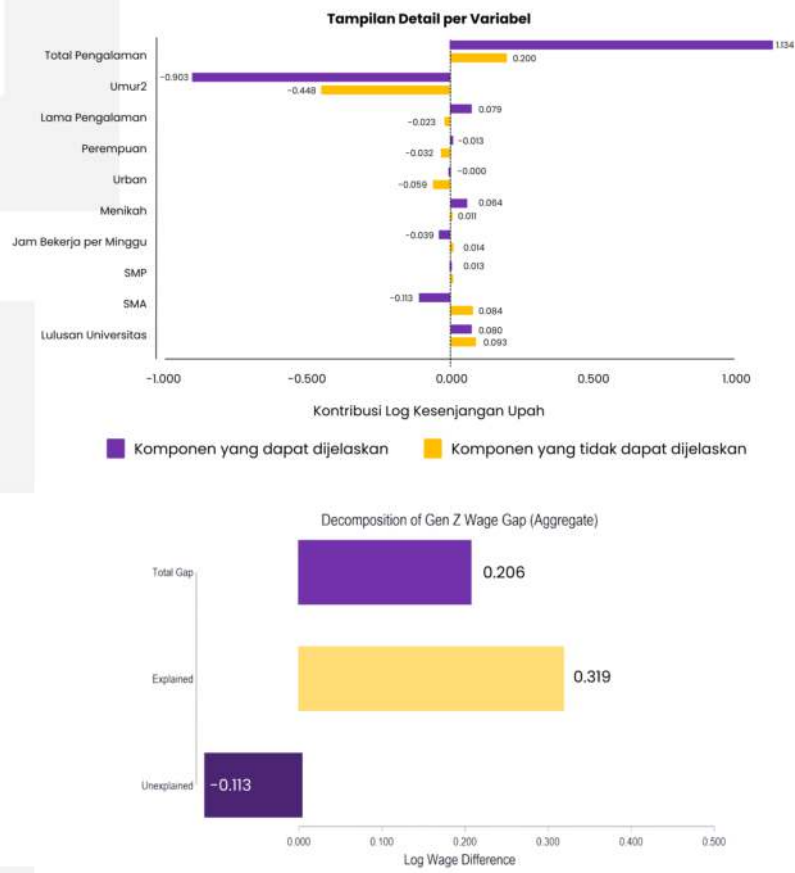


Sumber: Sakernas Agustus 2025, diolah oleh peneliti

Gambar 20 menegaskan bahwa kesenjangan upah bukan soal kemampuan, tetapi hasil dari sistem yang dibentuk oligarki. Senioritas menjadi faktor dominan bukan karena lebih produktif, tetapi karena sistem sengaja menghargai lamanya berada dalam struktur untuk melindungi kelompok lama. Bahkan pekerja dengan usia kerja yang lebih lama pun terjebak dalam posisi stagnan, sementara generasi muda yang lebih kompeten masuk dengan upah rendah dan mobilitas sosial yang macet. Kami juga menemukan bahwa ada kesenjangan upah sekitar 22,8%, di mana Gen-Z tertinggal jauh dibanding generasi yang lebih tua.

Gambar 20.

Faktor kesenjangan upah antara Gen Z dan non-Gen Z²²



Sumber: Sakernas Agustus 2025, diolah oleh peneliti
 Keterangan: analisis ini menggunakan oaxaca-blinder decomposition.



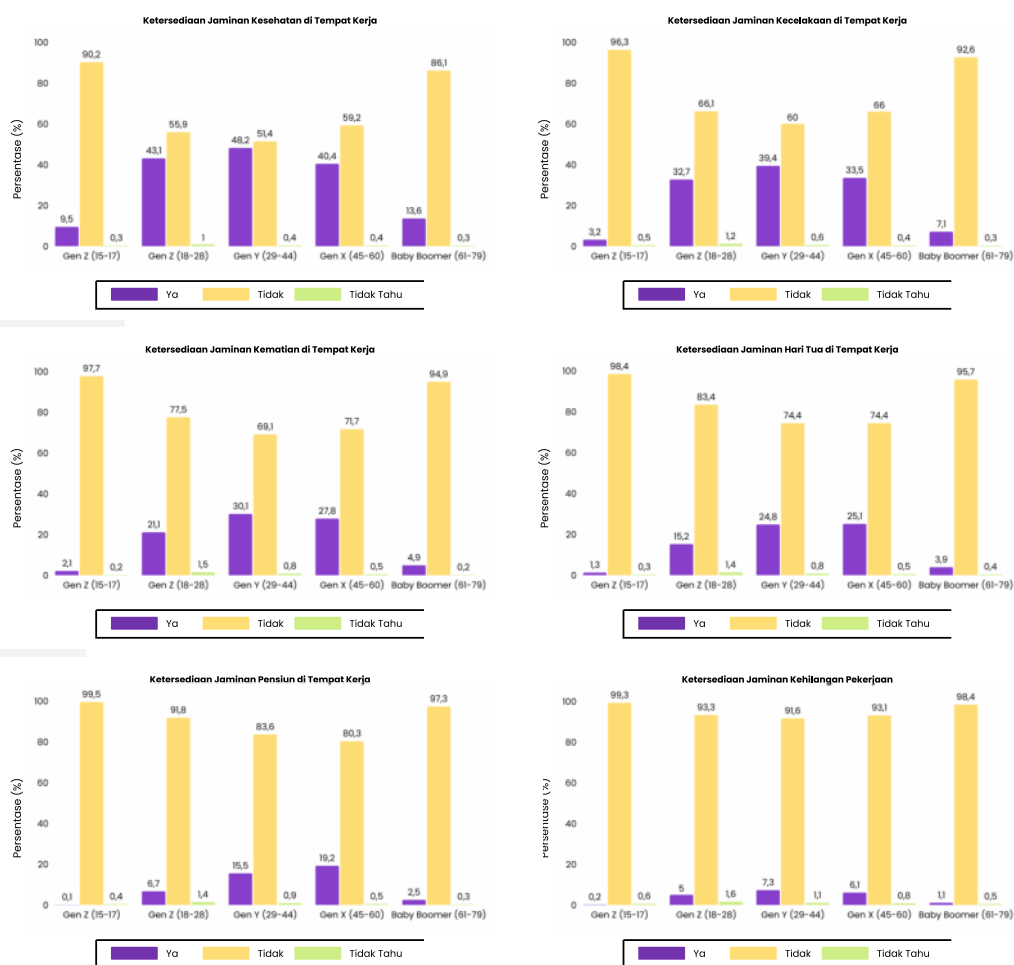
Dokumentasi CELIOS (2026)

Generasi Muda Bekerja dengan Minim Perlindungan dan Jaminan

In this economy, Gen Z dilarang sakit, dilarang kecelakaan dan dilarang meninggal. karena pekerjaan tidak memberi perlindungan apa pun. Tapi kalau tidak kerja sampai burnout, gimana mau makan dan bertahan?

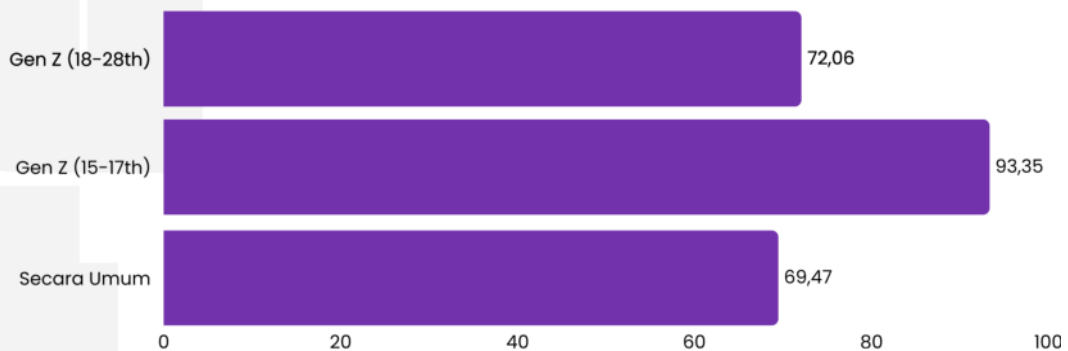
Bekerja di Indonesia dalam sistem yang dipengaruhi oligarki bukan hanya tidak menjamin kesejahteraan, tetapi secara aktif memproduksi kerentanan, terutama bagi generasi muda. Narasi “muda kaya raya, tua bahagia” hanya menjadi ilusi.

Gambar 21. Perlindungan Pekerja di Indonesia



Sumber: Sakernas Agustus 2025, diolah oleh peneliti

Gambar 22. Cuti Tidak Berbayar generasi muda



Sumber: Sakernas Agustus 2025, diolah oleh peneliti

Gambar 21 menunjukkan pola yang konsisten dan mengkhawatirkan: Gen Z adalah generasi dengan tingkat perlindungan kerja rendah, bahkan ketika dibandingkan dengan Gen Y yang berada tepat di atasnya. Gen Z usia 18–28 menghadapi kondisi kerja yang sangat rentan, dengan mayoritas tidak memiliki jaminan dasar: sekitar 55,9% tanpa jaminan kesehatan, 66,1% tanpa jaminan kecelakaan kerja, 77,5% tanpa jaminan kematian (lihat Gambar 21).

Udah kerja sampai tipes dan burnout, giliran ga perform cepet banget dipecat dan dapat gantinya, ga punya jaminan kehilangan pekerjaan. Zero safety net!

Sekitar 93,3% Gen Z tidak memiliki perlindungan jika kehilangan pekerjaan. Sekitar 83,4% tidak memiliki jaminan hari tua dan 91,8% tidak memiliki jaminan pensiun (lihat Gambar 21). Dibanding generasi di atasnya, posisi Gen Z jauh lebih rentan, masuk ke dunia kerja tanpa perlindungan dasar sekaligus tanpa jaminan keberlanjutan hidup.

Gambar 22 menunjukkan bahwa praktik cuti tidak dibayar juga sangat tinggi di Indonesia, terutama dialami oleh Gen Z. Sebanyak 72,06% Gen Z usia 18–28 tahun mengalami cuti tidak dibayar, jauh di atas rata-rata umum (69,47%).

Impian banyak orang, "Muda Kaya Raya, Tua Bahagia, Mati Masuk Surga"



Elite kita:
"Muda Kaya Raya,
Tua Bahagia,
Meski Mati
(belum tentu)
Masuk Surga"



Gen Z kita:
"Muda Kerja
Bagai Kuda,
Tua Masih Kerja,
Mati (belum tentu)
Masuk Surga"

Gambar 23. Generasi muda menanggung beban ekonomi yang timpang



Ketimpangan Upah: generasi muda Dibayar Lebih Rendah

- Gap upah antar generasi tetap lebar, bahkan di sektor yang sama
- 109 juta pekerja masih dibayar di bawah UMR
- generasi muda mendominasi kelompok berupah rendah



Kerja Berlebihan: Bertahan, Bukan Sejahtera

- 25 juta pekerja bekerja >48 jam/minggu
- generasi muda bekerja lebih lama untuk menutup upah rendah



Informalisasi: Karier Tanpa Kepastian

- Mayoritas generasi muda masuk sektor informal
- Tanpa kontrak, tanpa kepastian pendapatan -> keputusan hidup tertunda



Ojol sebagai "Jalan keluar sementara"

- Ojek online jadi pilihan paling mudah diakses
- Jam kerja panjang, pendapatan tidak stabil

Sumber: Diolah oleh peneliti

Apakah Meritokrasi Masih dianggap Penting di Indonesia?

Meritokrasi vs Nepotisme Struktural

Fakta yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa privilese dan nepotisme struktural itu hal yang riil.



Generasi Muda dari Keluarga Biasa		Generasi Muda dalam Lingkaran Oligarki
Mulai dari nol, tanpa koneksi kuat	Titik Awal	Sudah punya jaringan elite sejak lahir
Apply lewat platform seperti JobStreet, LinkedIn, Kalibr, Glints	Cara Cari Kerja	Dapat info dari orang tua, relasi bisnis, atau langsung ditawarkan
Kirim puluhan-ratusan CV, ikut tes online, psikotes, interview bertapis	Proses Masuk Kerja	Tidak perlu seleksi formal, langsung masuk lewat rekomendasi
Magang tidak dibayar / kerja kontrak pendek	Pengalaman Awal	Langsung dapat posisi strategis atau proyek penting
Staff junior, admin, sales, atau kerja informal	Posisi Awal Karier	Komisaris muda, project manager, advisor, atau posisi "strategic role"
Bergantung pada info publik (lowongan online, job fair)	Akses Informasi	Akses info internal: proyek, investasi, peluang bisnis
Sangat tinggi (ribuan pelamar untuk satu posisi)	Tekanan Kompetisi	Rendah, karena akses terbatas pada jaringan tertentu
UMR atau di bawah UMR, kadang freelance tidak stabil	Pendapatan Awal	Jauh di atas rata-rata, bahkan tanpa pengalaman panjang
Kerja serabutan, freelance, atau jadi ojol	Strategi Bertahan	Fokus membangun portofolio bisnis/jaringan
Tinggi: mudah di-PHK, kontrak habis, tidak diperpanjang	Risiko Karier	Rendah: dilindungi jaringan dan aset keluarga
Lambat, butuh waktu lama untuk naik kelas	Mobilitas Sosial	Cepat, karena akses modal dan peluang besar
Sulit dapat modal usaha atau kredit	Akses Modal	Mudah akses investor, bank, atau modal keluarga
Bangun dari nol, ikut seminar/job fair	Jaringan (Networking)	Sudah terhubung dengan pejabat, CEO, politisi
Harus kerja lebih keras untuk hasil yang belum pasti	Makna "Kerja Keras"	Kerja keras mempercepat, tapi bukan penentu utama
Apply 100+ lowongan, sering tidak dipanggil	Realita Lapangan	Tidak pernah "apply kerja" dalam arti formal
Sulit beli rumah, menabung, atau investasi	Dampak Jangka Panjang	Bisa akumulasi aset sejak muda
Terdorong ke bawah oleh ketimpangan	Struktur Sistem	Diuntungkan oleh sistem oligarkis

Kapan Generasi Muda Punya Rumah?

Di Indonesia, tanah, sebagai komponen utama harga rumah, banyak dikuasai segelintir elite yang memiliki akses izin, konsesi, dan modal besar. Kepemilikan ini sering tidak diimbangi pajak yang proporsional, sehingga tanah ditimbun dan dispekulasikan, mendorong harga properti naik jauh lebih cepat dari pendapatan generasi muda. Akibatnya, masalahnya bukan sekadar tidak mampu membeli rumah, tetapi karena akses terhadap tanah sudah dikunci oleh struktur oligarkis, sementara harga properti terus naik. Dampaknya, generasi muda terpaksa tinggal semakin jauh dari pusat ekonomi dan menanggung biaya hidup lebih tinggi.

Bahkan rumah subsidi Rp166–185 juta (DP 1–5%, bunga ±5%) tetap di luar jangkauan Gen Z: cicilannya menyerap 31–35% gaji UMR bulanan, bahkan hingga ±48% dari gaji Rp2,2 juta (studi kasus), membuat membeli rumah terasa hampir mustahil.

Rumah adalah kebutuhan dasar setara pangan dan kesehatan, sekaligus kunci akses pendidikan, pekerjaan, dan stabilitas hidup^{23,24,25}. Bagi generasi muda, kepemilikan rumah juga berarti kemandirian, kesiapan berkeluarga, serta alat akumulasi aset, bahkan menjadi “jaminan sosial” di tengah sistem perlindungan yang lemah^{26,27,28,29}. Namun, aksesnya tidak setara. Meski ada rumah subsidi seharga Rp166–185 juta dengan DP 1–5%, bunga ±5%³⁰, dan tenor hingga 20 tahun, kemampuan membelinya tetap bergantung pada posisi ekonomi awal.



Dokumentasi CELIOS (2026)

Studi Kasus

Hak Istimewa Keluarga dan Runtuhnya Meritokrasi

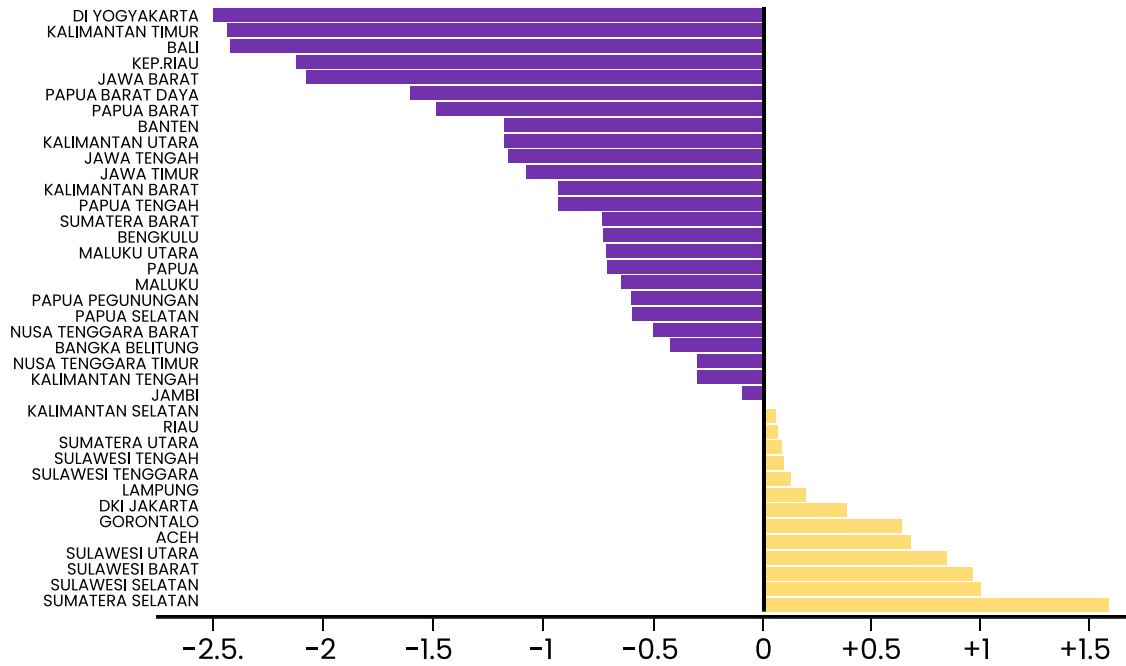


Perbandingan pendapatan ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang dihadapi generasi muda bukan soal kurang skill atau pendidikan. Seorang lulusan S1 dengan UMR Yogyakarta (Rp2,2 juta/bulan) membutuhkan sekitar 88 bulan kerja untuk menyamai satu hari keuntungan anak pejabat dengan puluhan dapur SPPG dalam program MBG yang diperkirakan menghasilkan Rp200 juta per hari.

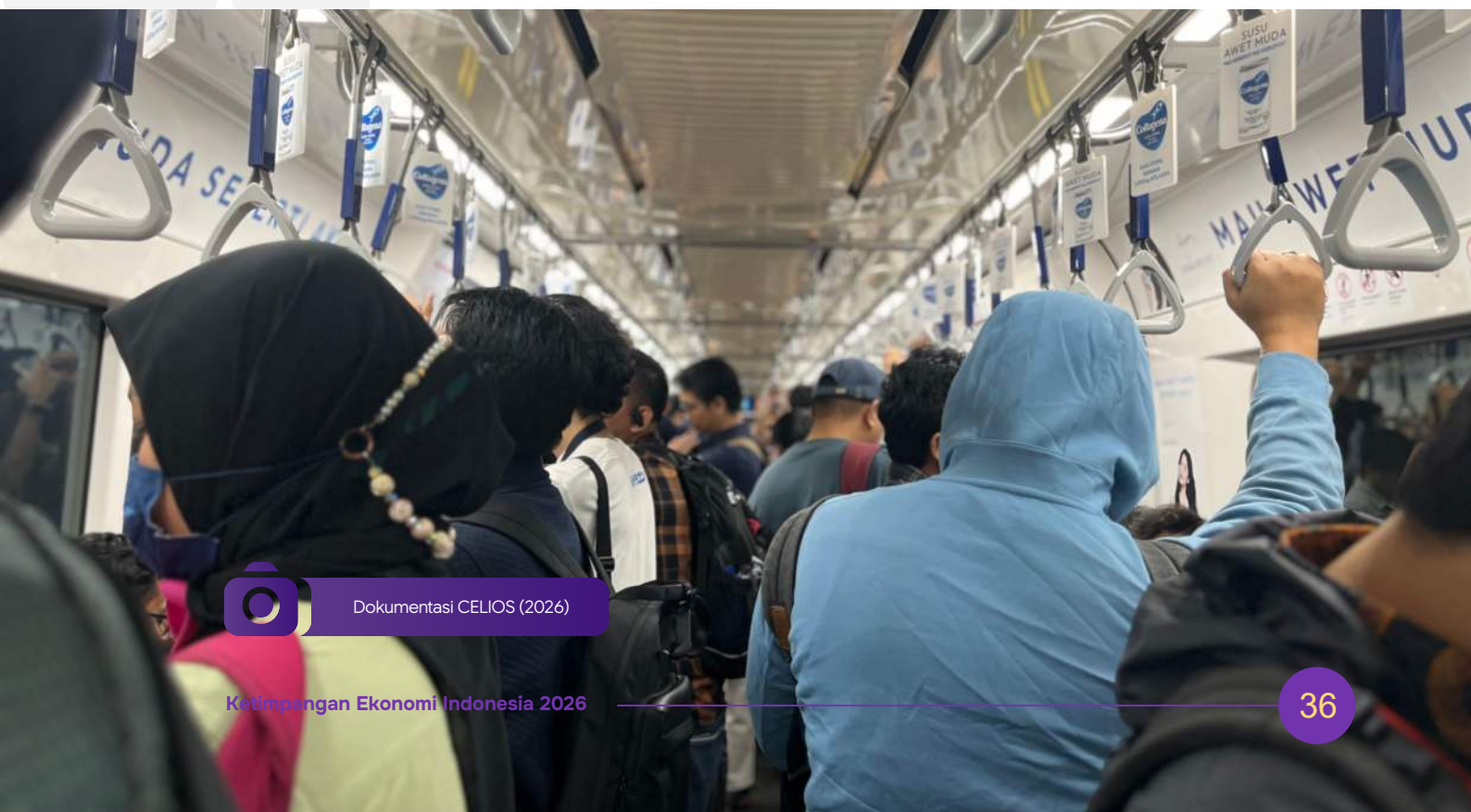
Ketika kerja formal berpendidikan tinggi tidak mampu menyaingi pendapatan berbasis koneksi dan modal, maka pasar kerja gagal menjadi jalur mobilitas sosial. Perbandingan ini menunjukkan ketimpangan ekstrem yang nyaris absurd: generasi muda dengan pendapatan setara UMR (\pm Rp2,26 juta/bulan) bahkan untuk mengakses rumah subsidi pun membutuhkan waktu bertahun-tahun, atau tidak tercapai sama sekali tanpa dukungan, sementara anak DPRD dengan pendapatan Rp200 juta per hari dapat membeli rumah, bahkan tanpa KPR, hanya dalam hitungan 1–3 hari.

Harga properti terus terdorong naik, jauh melampaui kemampuan pendapatan generasi muda. Sementara itu, gaji mayoritas Gen Z hanya berkisar setara UMR dengan status “karjimut” atau karyawan gaji imut (lihat gambar 24)

Gambar 24. UMR yang tidak cukup untuk menghidupi keluarga



Sumber: Kemenaker 2025, diolah peneliti



Dokumentasi CELIOS (2026)

“

Ketika generasi muda miskin gagal, mereka disalahkan karena kurang gigih dan inkompeten, bahkan dianggap “penakut mengambil peluang”. Namun ketika generasi muda kaya melesat cepat, keberhasilannya jarang dipertanyakan. Nepotisme seringkali dianggap “kesempatan”, sementara kegagalan struktural justru disimplifikasi menjadi masalah individual.

3

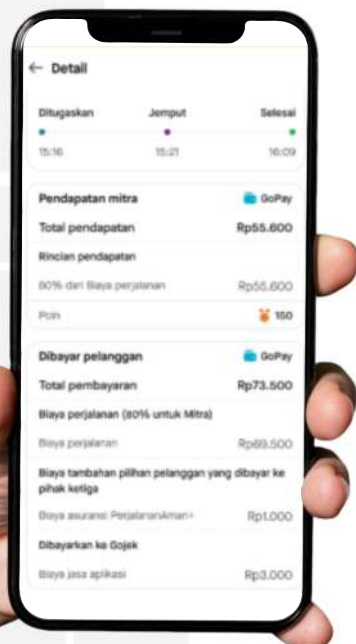
Pengemudi Ojek Online dan Wajah Nyata Ketimpangan Ekonomi Modern

Kondisi yang dialami pengemudi ojek online bukanlah anomali, tetapi bagian dari pola ketimpangan ekonomi yang lebih luas. Model bisnis ojol menjadi contoh paling sempurna bagaimana sistem ekonomi eksploitatif ini bekerja dimana keuntungan terkonsentrasi di tingkat atas, sementara risiko dan beban didorong ke bawah, kepada pekerja.

Apa yang terlihat sebagai “fleksibilitas” dan “kemitraan” sebenarnya adalah bentuk baru dari ketimpangan struktural, di mana pekerja tidak memiliki perlindungan, tetapi tetap berada dalam kontrol penuh sistem ekonomi yang tidak adil.

Model bisnis platform digital bergantung pada komisi dari setiap transaksi, semakin besar potongan yang diambil, semakin besar keuntungan dan valuasi perusahaan, dengan algoritma yang mengatur tarif, insentif, dan distribusi order yang lebih menguntungkan perusahaan. Di sisi lain, status “mitra” digunakan untuk menghindari kewajiban seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan kerja, sehingga seluruh risiko, pendapatan tidak pasti, biaya operasional, ditanggung oleh pengemudi, sementara kontrol tetap berada di tangan platform (lihat Gambar 25).

Gambar 25. Mekanisme Pembagian Komisi antara Platform dan Pengemudi Ojek Online



Gambar 25 menunjukkan pembagian nilai transaksi ojek online yang timpang, di mana pengemudi hanya menerima sekitar Rp55.600 atau 80% dari “biaya perjalanan”, sementara 20% diambil platform sebagai komisi. Ketimpangan ini diperkuat oleh narasi fleksibilitas kerja, padahal pengemudi tetap berada di bawah kontrol algoritma yang mendorong mereka bekerja lebih lama, terutama saat sepi orderan. Banyak pengemudi bahkan harus menggunakan lebih dari satu aplikasi untuk menjaga pendapatan, menandakan ketidakstabilan penghasilan dari satu platform saja.

Sumber: Wawancara kualitatif dengan Pengemudi Ojek Online, 2026

Studi ini menunjukkan pembagian nilai transaksi ojek online yang timpang, di mana pengemudi hanya menerima sekitar Rp55.600 atau 80% dari “biaya perjalanan”, sementara 20% diambil platform sebagai komisi. Ketimpangan ini menjadi pemakluman dibalik narasi fleksibilitas kerja. Banyak pengemudi bahkan harus menggunakan lebih dari satu aplikasi untuk menjaga pendapatan, karena ketidakstabilan penghasilan dari satu platform saja.

Di lapangan, pengemudi bekerja hingga 42 km per hari selama 10–11 jam (bahkan lebih), melampaui standar kerja normal³¹. Namun, pendapatan bulanan mereka tetap di bawah UMR; di Bekasi misalnya, hanya sekitar Rp3,9 juta atau 79% dari Rp5 juta (UMR Bekasi)³². Di tengah kenaikan biaya hidup, pendapatan riil terus menurun. Ironisnya, valuasi platform justru meningkat, dengan keuntungan terkonsentrasi pada investor sementara pengemudi tetap menghadapi upah rendah dan ketidakpastian kerja.

Gambar 26. Siklus Kehidupan Pengemudi Ojol



Tabel 3. Dimensi Eksploitasi dan Mekanisme Kontrol dalam Bisnis Ojek Online

Isu Utama	Eksploitasi Ekonomi	Kontrol Elit Ekonomi
 Status "Mitra" Semu	 Driver disebut mitra, tapi tidak punya kendali atas tarif dan kerja	 Menghindari kewajiban pekerja formal, tapi tetap mengontrol penuh
 Algoritma sebagai "Bos"	 Order, rating, dan suspend ditentukan sistem	 Kontrol perilaku driver lewat algoritma tertutup
 Risiko Ditanggung Driver	 BBM, perawatan, dan kecelakaan ditanggung sendiri	 Risiko dipindahkan agar biaya perusahaan rendah
 Tarif Murah	 Harga rendah menekan pendapatan driver	 Tarif dikontrol untuk menarik pasar dan meningkatkan volume transaksi
 Eksploitasi Waktu Bekerja	 Driver bekerja dengan jam yang panjang	 Insentif didesain agar driver terus aktif
 Kematian karena Lelah	 Ada kasus driver meninggal saat bekerja	 Tidak ada batas jam kerja dalam sistem
 Insentif Berisiko	 Bonus mendorong kerja berlebihan	 Perilaku diarahkan tanpa paksaan langsung
 Biaya Tersembunyi	 Kesehatan dan penyusutan tidak dihitung	 Hanya pendapatan kotor yang ditonjolkan
 Over-supply Driver	 Driver banyak, pendapatan makin kecil	 Kompetisi dijaga untuk tekan tarif
 Ketimpangan Waktu Hidup	 Waktu istirahat dan keluarga terkorbankan	 Tidak ada kompensasi atas waktu
 Mobilitas Mandek	 Sulit naik kelas secara ekonomi	 Model tidak dirancang untuk peningkatan ekonomi driver
 Normalisasi Penderitaan	 Lelah dan risiko dianggap wajar	 Narasi kerja keras dipertahankan
 Ketimpangan Empati	 Konsumen fokus pada layanan cepat	 Ekspektasi dibentuk oleh platform
 Regulasi Lemah	 Perlindungan sosial minim	 Celah aturan dimanfaatkan

Sumber: Analisis Penulis



Ojol dipaksa bertarung di jalanan sambil dikendalikan algoritma, mengejar order, waktu, dan insentif yang terus berubah. Mereka yang menanggung bensin, servis, dan risiko di jalan. Sementara di atas sana, pemilik platform menikmati hasilnya tanpa harus menyentuh aspal atau keluar biaya perawatan sepeser pun

4

Dari Ketimpangan ke Ketidak berdayaan: Perempuan dalam Sistem Oligarkis

Oligarki menjadi penyebab dari ketimpangan, karena elite kaya dapat mendominasi kebijakan meskipun dalam sistem demokrasi formal^{33,34}. Elite ekonomi bertindak sebagai pembentuk hukum dan menghambat reformasi yang dapat mengancam kekayaan atau privilese mereka^{35,36}. Kondisi ini memperkuat ketimpangan sosial dan melemahkan prinsip demokrasi tentang partisipasi yang setara³⁷.

Dalam sistem oligarki, pemberdayaan perempuan tidak diprioritaskan karena dapat meningkatkan biaya produksi, memperkuat posisi tawar pekerja, dan mendorong kebijakan yang lebih adil. Akibatnya, meskipun ketimpangan gender sudah ada sebelumnya, oligarki terus mereproduksi dan memperdalamnya, menjaga perempuan tetap berada di posisi paling rentan dalam sistem.

Ketimpangan gender memang sudah ada sejak dekade bahkan abad lalu, tetapi dalam sistem oligarki, ketimpangan gender ini dimanfaatkan dan diperkuat karena menguntungkan elite. Sistem ini bergantung pada tenaga kerja murah, kontrol kebijakan, dan stabilitas, sehingga posisi perempuan yang lebih lemah (upah rendah, kerja informal, minim perlindungan, dan beban domestik) justru dipertahankan.

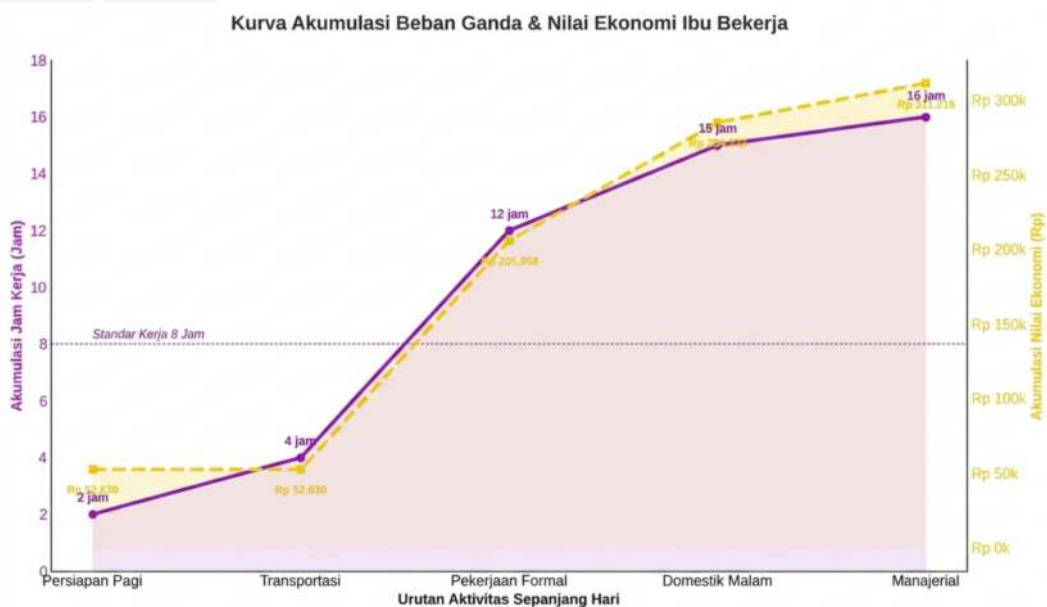
Perempuan Bertahan Hidup dari Ketidakadilan Ekonomi

Perempuan di Indonesia terjebak dalam struktur kerja yang tidak adil (lihat Gambar 27), seperti: upah rendah, minim perlindungan, dan dibebani biaya pengasuhan anak (*childcare*) dari kantong sendiri, sementara negara, yang dipengaruhi kepentingan oligarkis, gagal menghadirkan kebijakan *childcare* yang memadai untuk mengoreksi ketimpangan tersebut.



Dokumentasi CELIOS (2026)

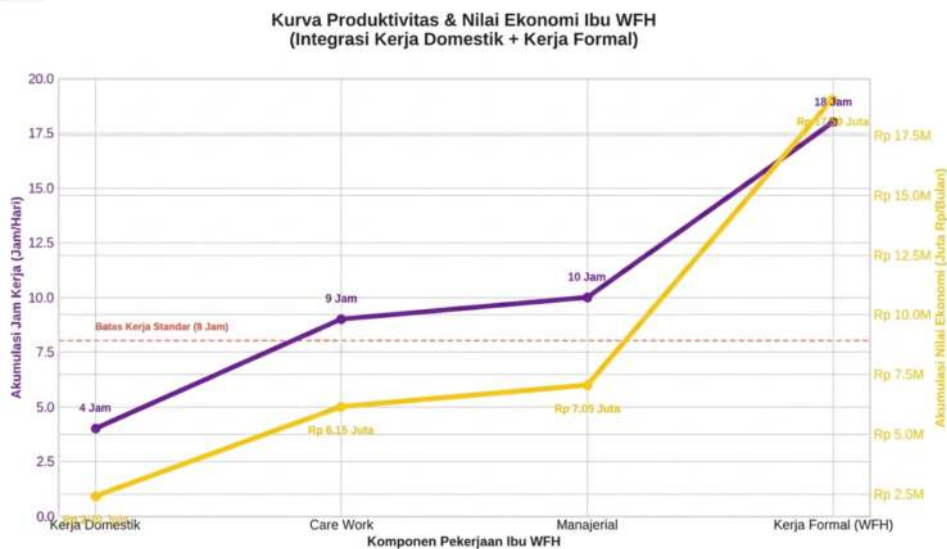
Gambar 27. Simulasi 1: Simulasi Beban Ganda Ibu Bekerja



Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Gambar 27 dan 28 menunjukkan bahwa ibu bekerja (termasuk WFH) menanggung beban hingga 16–18 jam per hari, jauh melampaui standar kerja, dengan nilai ekonomi yang signifikan (hingga sekitar Rp19 juta per bulan), namun sebagian besar berasal dari kerja domestik dan care work yang tidak dibayar dan tidak diakui. Hal ini menegaskan bahwa sistem ekonomi bergantung pada kerja reproduktif perempuan untuk menopang produktivitas sektor formal tanpa menanggung biayanya.

Gambar 28. Simulasi 2: Simulasi Nilai Ekonomi Kerja Ibu WFH³⁸



Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif atau subsidi bagi perempuan untuk meringankan beban biaya childcare berbayar, atau sebagai bentuk kompensasi atas beban kerja ganda yang mereka tanggung. Dengan demikian, biaya pengasuhan tidak sepenuhnya dibebankan pada pengeluaran rumah tangga atau pendapatan yang mereka peroleh, melainkan menjadi bagian dari dukungan kebijakan publik yang lebih adil.

Gambar 29. Identifikasi Masalah yang Dihadapi Perempuan di Sistem Oligarki

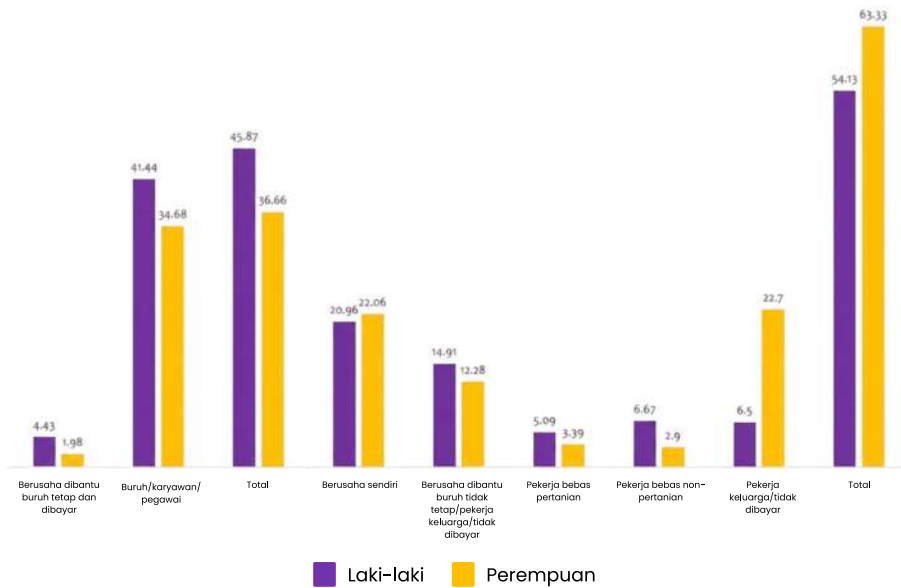


Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Sistem yang dibentuk Oligarki Semakin Mencekik Perempuan

Di Indonesia, status ekonomi perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki sudah terjadi sejak tahun 1995, dimana lebih dari 65 persen angkatan kerja perempuan bekerja di sektor informal³⁹. Setelah tiga dekade berlalu, pada tahun 2025, porsi perempuan masih mendominasi sektor informal sebesar 63,33 persen lebih tinggi dari laki-laki yang hanya 54,13 persen. Sebaliknya porsi perempuan lebih sedikit dari laki-laki di sektor formal, yakni 36,66% berbanding 45,87% (lihat gambar 30). Fenomena ini membuktikan bahwa tidak ada intervensi serius dari pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam struktur ketenagakerjaan selama 30 tahun terakhir.

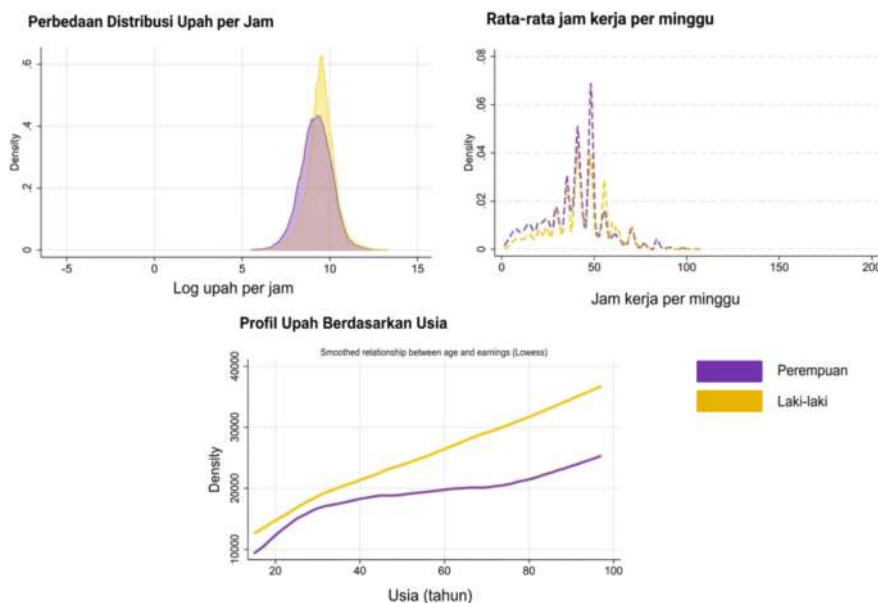
Gambar 30. Lebih Banyak Perempuan Bekerja di Sektor Informal



Sumber: Sakernas Agustus 2025, diolah oleh peneliti

Gambar 31 juga menunjukkan ketimpangan upah sepanjang hidup: perempuan sudah tertinggal sejak usia 20-an dan kesenjangan terus melebar hingga usia lanjut, bahkan upah perjam mereka lebih rendah dari pada laki-laki, menandakan akumulasi ketidakadilan yang semakin besar seiring waktu.

Gambar 31. Kesenjangan Upah Berdasarkan Gender



Sumber: Sakernas Agustus 2025, diolah peneliti

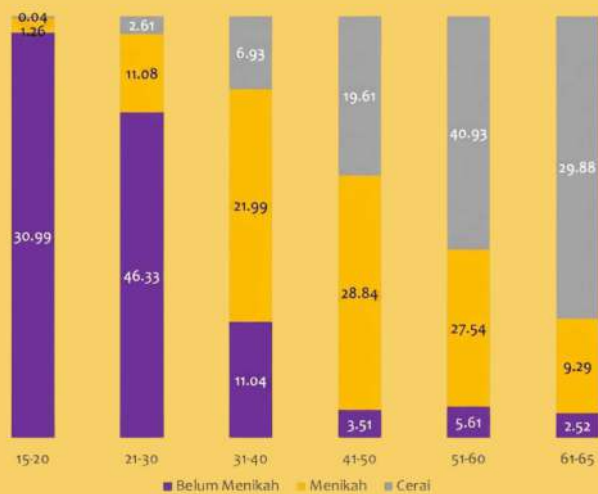
Tahukah kamu?

Sebanyak 623.937 perempuan usia 15–65 tahun putus asa mencari kerja, didorong terbatasnya lapangan kerja formal dan ketidakmampuan pasar menyerap tenaga kerja terdidik. Pada perempuan yang belum menikah, 77,32% yang putus asa didominasi usia muda (15–30), sementara 50,83% perempuan menikah terhambat oleh diskriminasi status perkawinan (lihat Gambar 32).

Kondisi lebih berat dialami perempuan bercerai, terutama usia 51–60, yang menghadapi diskriminasi ganda, gender dan usia. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada kompetensi, melainkan pada struktur pasar kerja yang diskriminatif, yang terus memperlebar kesenjangan ekonomi dan memerangkap perempuan dalam kerentanan.

Dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas: ketika perempuan tersingkir dari pasar kerja, potensi ekonomi terbuang, ketergantungan meningkat, dan risiko kemiskinan rumah tangga semakin tinggi. Tanpa perubahan pada sistem yang lebih inklusif dan adil, kondisi ini akan terus mereproduksi ketimpangan lintas generasi.

Gambar 32. Banyak perempuan putus asa mencari kerja



Sumber: Sakernas Agustus 2025, diolah oleh peneliti

5 Militer Dibalik Oligarki

Keterlibatan militer di sektor bisnis ekstraktif makin menguat di era Prabowo-Gibran. Kebijakan aneksasi aset dari perusahaan tambang dan sawit yang merupakan aktivitas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tertuang dalam beberapa regulasi.

Salah satu contohnya, Peraturan Presiden No. 5/2025 tentang pembentukan Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Mabes TNI dengan Kementerian Kehutanan. Satgas Garuda PKH dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, dan hingga akhir Maret 2025 telah menyita sekitar 538.868 hektar perkebunan sawit yang langsung diserahkan ke PT Agrinas.

PT Agrinas sendiri dipimpin oleh purnawirawan TNI yang menambah panjang deretan ex-petinggi militer dalam pengelolaan BUMN sektor ekstraktif. Perlu dicatat, *holding* BUMN tambang PT Mind ID dikelola oleh Maroef Sjamsoeddin, purnawirawan Marsekal Muda TNI Angkatan Udara, menjabat Direktur Utama MIND ID sejak RUPS Maret 2025.

Selanjutnya TNI menggelar Latihan Terintegrasi 2025 di Bangka Belitung dan Morowali, dua wilayah dengan kekayaan sumber daya alam tinggi sekaligus rawan tambang ilegal. Di Bangka Belitung, dilakukan simulasi penangkapan ponton ilegal dan peninjauan lokasi galian pasir. Polemik berlanjut di Morowali, kehadiran TNI mengamankan bandara IMIP karena dianggap celah kebocoran ekspor dan impor barang ilegal. Padahal bandara IMIP telah memiliki izin sebelumnya dari Kementerian Perhubungan.

Paska banjir Sumatera, terdapat 9 perusahaan yang diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan 24 perusahaan oleh Kementerian Kehutanan. Perusahaan yang terindikasi melakukan deforestasi, perubahan alih fungsi lahan dan menyebabkan bencana banjir pada awalnya dihentikan operasionalnya. Publik berharap agar lahan kritis yang terdegradasi dikembalikan menjadi ekosistem awal. Namun, muncul rencana pengalihan izin usaha perusahaan yang terbukti bersalah ke BUMN. Disaat yang bersamaan muncul Perminas, perusahaan BUMN baru yang bertugas mengelola mineral tambang.

Tarik menarik kepentingan militer juga terlihat dalam peristiwa yang disebut perang bintang di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Perang bintang melibatkan dua perusahaan besar memperebutkan lahan: PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) yang bergerak di tambang besi dan batu bara, dan PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) milik pengusaha Haji Isam yang membangun perkebunan sawit. Konflik ini melibatkan institusi bersenjata di level pimpinan tertinggi, MSAM mempekerjakan personel Brimob untuk mengawal penanaman sawit, sementara SILO mencari perlindungan dari militer, termasuk melibatkan koperasi TNI dalam pengamanan area tambang.

Ada beberapa konsekuensi dari menguatnya peran militer dalam bisnis ekstraktif:



Pertama, rusaknya persaingan usaha di sektor pertambangan dan sawit. Militer bekerjasama dengan BUMN melakukan perampasan lahan, dikelola secara penunjukkan langsung.



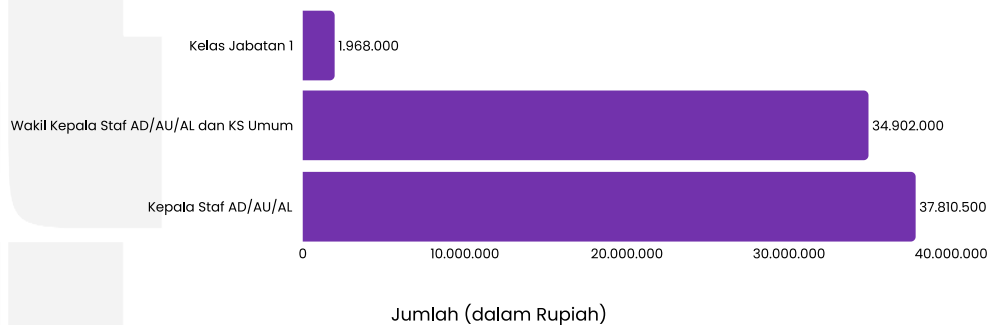
Kedua, upaya untuk melakukan revitalisasi atau pemulihan lahan hasil penyitaan izin oleh aparat penegak hukum pupus. Kepentingan untuk melanjutkan eksploitasi alam, merupakan kolaborasi militer dan BUMN. Kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan tidak dijadikan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan strategis.



Ketiga, masyarakat adat dan sipil berhadapan langsung dengan militer dalam mempertahankan ruang hidup dari ekspansi tambang maupun sawit. Ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dengan kehadiran militer menunjukkan adanya kapitalisme negara yang makin merugikan ekonomi jangka panjang.

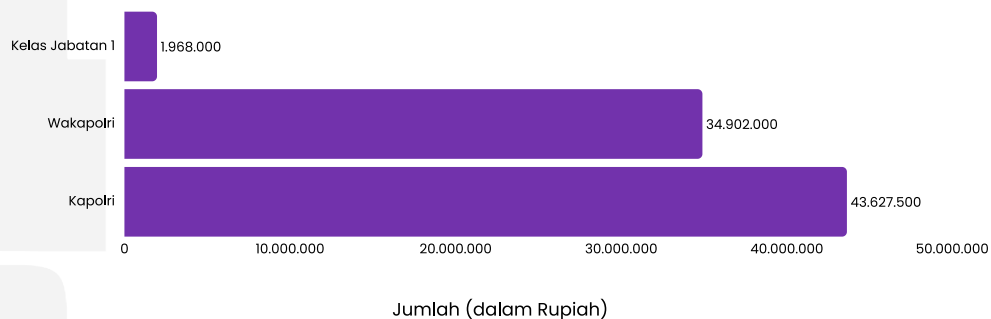
Ketimpangan Insentif Sebagai Akar Keterlibatan Militer dalam Bisnis

Gambar 33. Ketimpangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018

Gambar 34. Ketimpangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018

Struktur insentif dalam institusi militer dan kepolisian juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Bahkan tunjangan kinerja antara kelas jabatan terendah dan pimpinan tertinggi di lingkungan tentara berbeda 18 kali lipat sedangkan di kepolisian lebih dari hingga 22 kali lipat. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi kesejahteraan yang sangat hierarkis, sekaligus membuka ruang bagi dorongan pencarian sumber pendapatan tambahan di luar mekanisme formal. Dalam hal ini, keterlibatan militer sektor bisnis ekstraktif tidak dapat dilepaskan dari struktur insentif internal yang timpang (lihat Gambar 33 & 34).

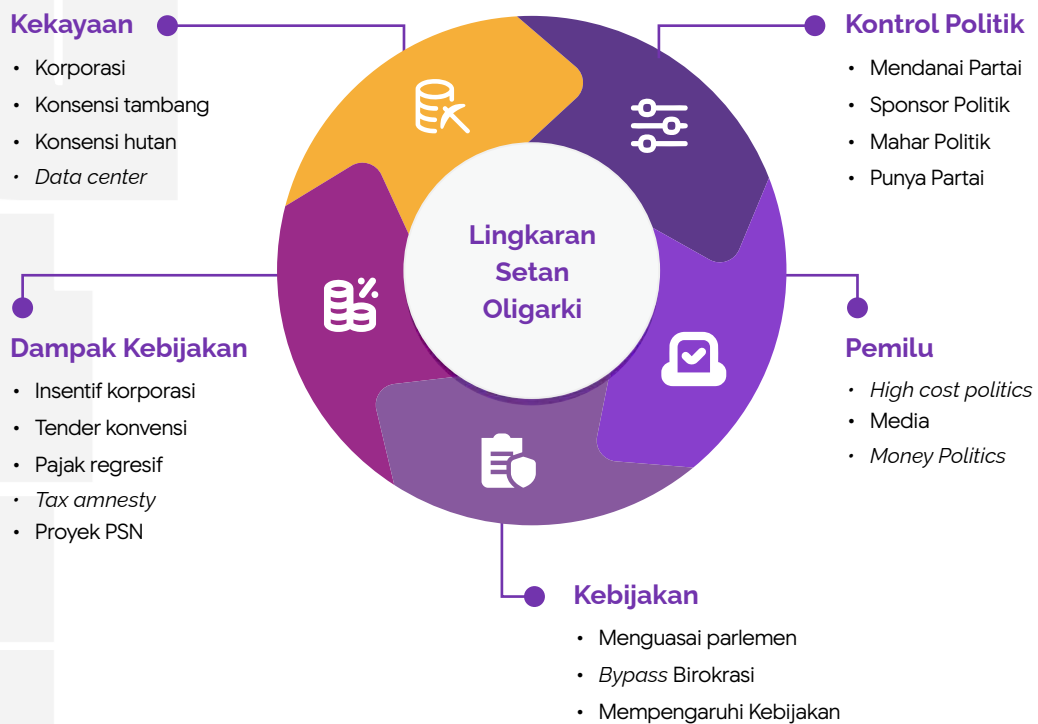
“

Di dalam institusi hukum, yang berada di garis depan menerima uang paling sedikit, sementara pejabat tingginya dapat uang paling banyak. Mereka yang bertaruh nyawa menjaga keamanan justru hidup pas-pasan, menghitung cicilan dari bulan ke bulan

6 Partai oligarki

Partai oligarki⁴⁰ menjadi salah satu cara melanggengkan kekuasaan dan posisi dari para elite. Partai tidak lagi berfungsi sebagai institusi representasi publik, melainkan sebagai instrumen perlindungan kepentingan elite ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang pendapat Winters (2011) bahwa Oligarki adalah sistem di mana individu dengan kekayaan ekstrem menggunakan kekuatan material mereka untuk mempertahankan dan melindungi kekayaannya dari redistribusi oleh negara maupun masyarakat melalui semua institusi politik yang tersedia, termasuk partai politik.

Gambar 35. Oligarki dalam Pakaian Demokrasi: Bagaimana Elite Mengakuisisi Partai



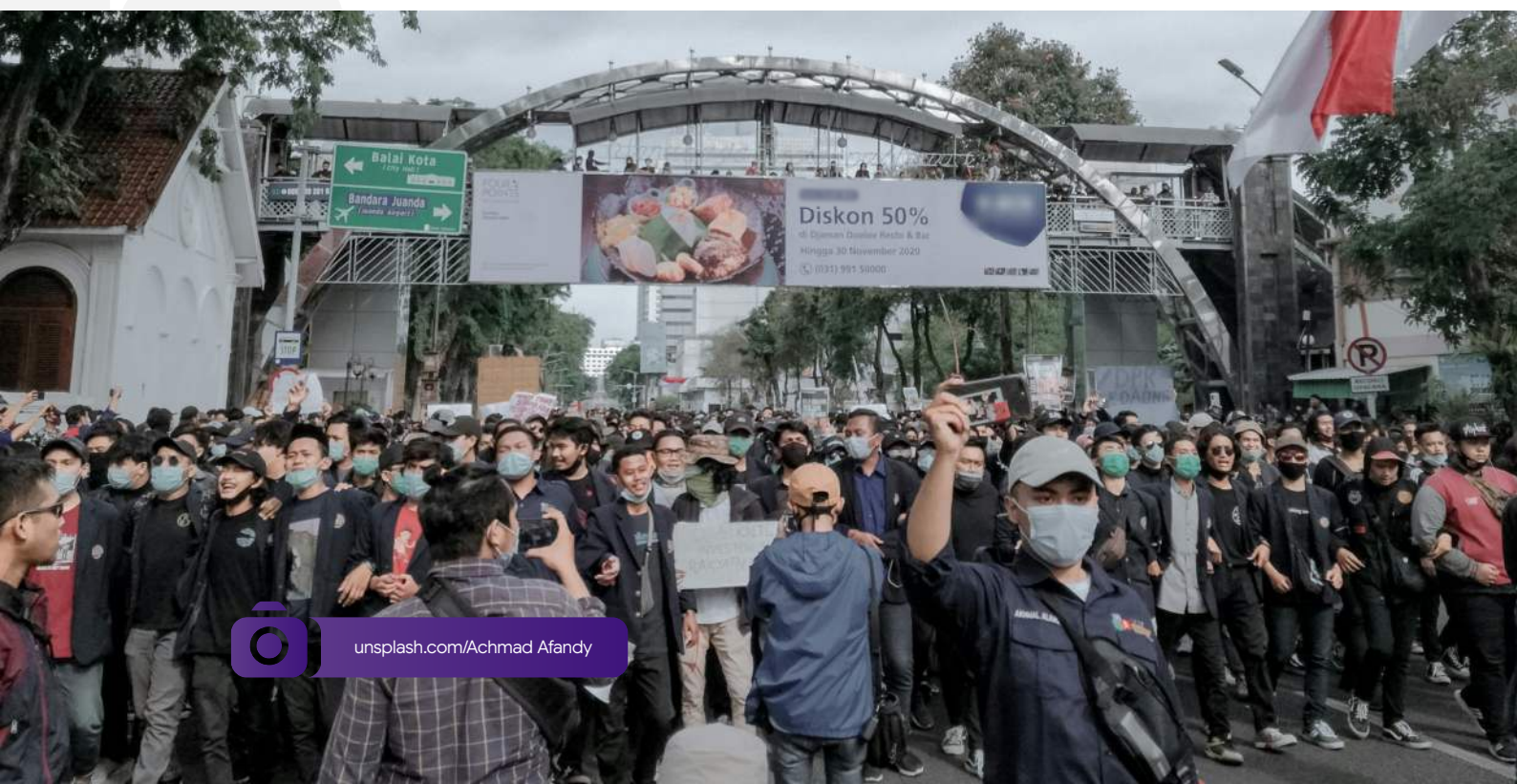
Sumber: Analisis Peneliti

Dalam konteks Indonesia, oligarki politik dipahami sebagai persilangan antara akumulasi kekayaan ekstrem dan kontrol atas institusi negara, sebagaimana dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters melalui konsep *oligarchic capitalism*⁴¹, di mana segelintir elite super-kaya menggunakan kekuasaan politik untuk melindungi dan memperluas aset mereka. Dinamika ini diperkuat oleh fenomena *state capture*⁴² sebagaimana diuraikan oleh Joel S. Hellman, ketika aktor-aktor ekonomi mampu membentuk regulasi, kebijakan fiskal, hingga arah pembangunan agar selaras dengan kepentingan bisnis mereka.

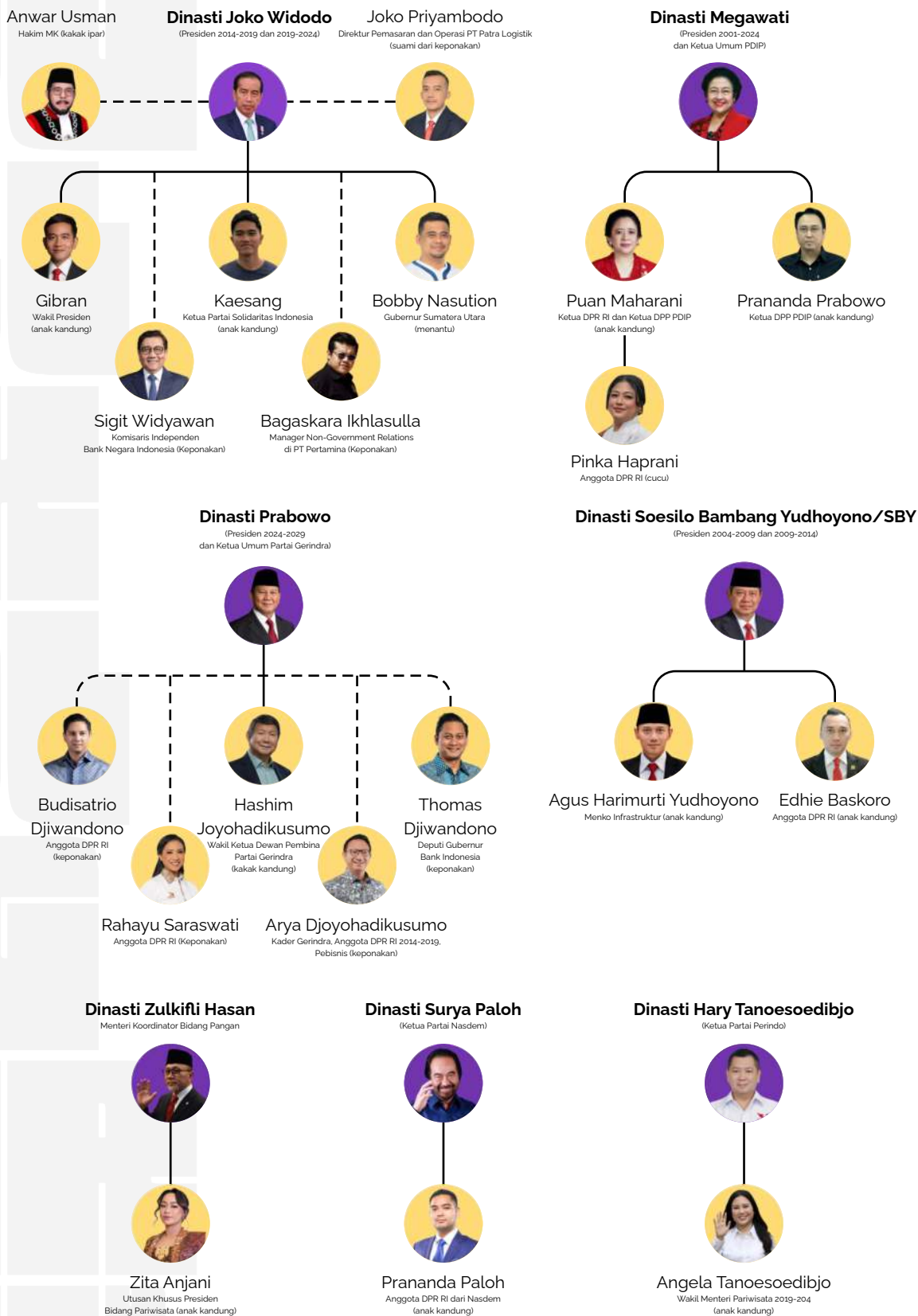
Dalam kerangka ini (lihat Gambar 35), demokrasi elektoral tidak berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekuasaan, melainkan sebagai arena kompetisi antar-oligarki. Reformasi 1998 gagal menghancurkan struktur oligarki, melainkan mereorganisasinya ke dalam format baru yang lebih adaptif terhadap sistem demokrasi, sehingga kekuasaan tetap terkonsentrasi pada jaringan elite lama dan baru hingga sekarang⁴³.

Biaya politik biasanya terdiri dari biaya kampanye dan logistik umum, mahar politik dan biaya mobilisasi pemilih⁴⁴. Saat ini, biaya politik untuk menjadi calon bupati/walikota dan wakil bupati/walikota berkisar Rp30 miliar, sedangkan calon gubernur dan wakil gubernur bisa mencapai Rp100 miliar. Biaya politik di level calon presiden dan wakil presiden mencapai Rp9,8 triliun⁴⁵.

Oligarki Politik menggunakan kontrol politik dengan mendanai partai, sponsor politik, menetapkan mahar politik, dan membeli partai untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilu yang berongkos tinggi dan membutuhkan jaringan media untuk kemenangan menjadi alat prosedural dan jauh dari kata demokratis. Setelah berkuasa, oligarki politik menciptakan kebijakan untuk menguntungkan kroni dan golongannya, maka penguasaan parlemen dan eksekutif atau koalisi gemuk adalah sebuah keharusan. Bahkan, dewasa ini fusi kekuasaan juga sudah merembet pada penguasaan yudikatif dan lembaga keamanan/militer untuk memperkuat posisi. Semua upaya penguasaan ini dibutuhkan untuk memastikan kebijakan bisa memberikan insentif pada korporasi⁴⁶, tender konsensi⁴⁷, pajak regresif⁴⁸, pengampunan pajak orang super kaya⁴⁹, dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)⁵⁰ yang problematis.



Gambar 36. Peta Parpol Dikuasai Oligarki Politik



Tabel 4 menunjukkan peta politik nasional, yang mana partai politik besar di Indonesia dikuasai oleh segelintir keluarga politik sebagai embrio oligarki politik. Keluarga politik ini mewariskan partai politik hanya kepada keluarganya, dikuasai bersama kroni-kroninya. Hal inilah yang menyebabkan keluarga politik ini menjadi bibit tumbuhnya oligarki politik. Fenomena ini yang disebut dengan Partai Oligarki, ketika partai politik yang seharusnya menjadi kendaraan demokrasi, malah menjadi kendaraan oligarki untuk menguasai pemerintahan dan sumber-sumber kekayaan. Hasil pemilu 2024⁵¹ menunjukkan oligarki politik di atas menguasai 57,08% suara dan menghasilkan 61,55% kursi di parlemen.

Tabel 4. Akumulasi Harta Oligarki Politik



Sumber : LHKPN KPK dan media (2024)

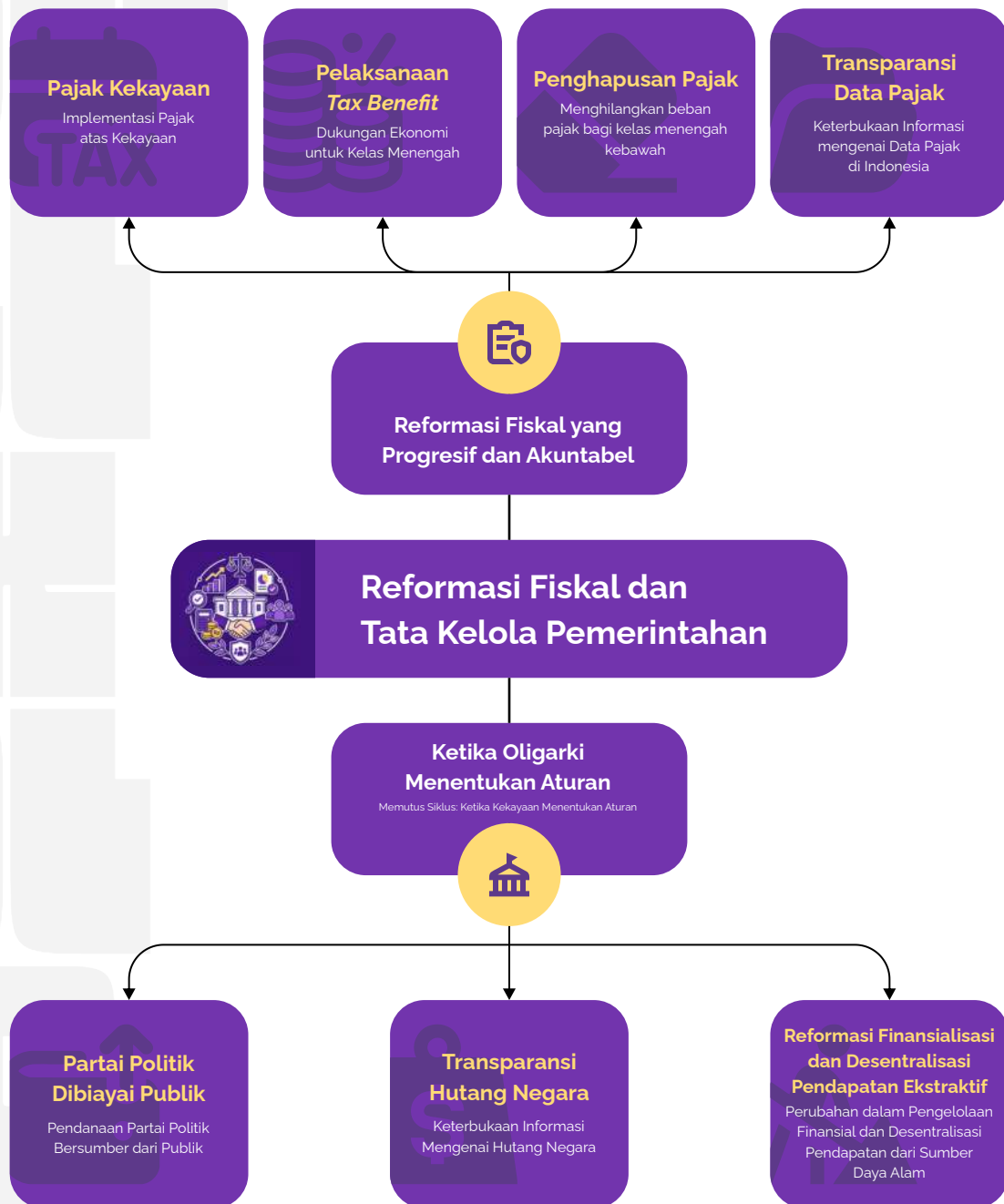
“

Jika tidak ada perubahan dalam struktur oligarki politik di Indonesia, maka besar kemungkinan presiden tahun 2029, 2034, 2039, 2044, dan 2049 adalah anak, cucu, atau keluarga dari pemilik partai dan penguasa hari ini. Kekuasaan di Republik Oligarki bukan lagi dipilih, tapi diwariskan seperti tahta

7 Rekomendasi Kebijakan

Studi ini menekankan bahwa reformasi fiskal dan tata kelola pemerintahan harus diarahkan untuk memutus dominasi oligarki dalam menentukan aturan ekonomi dan politik. Di sisi fiskal, langkah seperti pajak kekayaan, penguatan *tax benefit* bagi kelas menengah, penghapusan pajak bagi kelompok bawah, serta transparansi data pajak bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel.

Gambar 37. Rekomendasi dalam mengurangi ketimpangan dan pengaruh oligarki



Sumber: Diolah oleh peneliti

Di sisi politik dan tata kelola, pembiayaan publik untuk partai, pembatasan masa jabatan presiden, serta transparansi utang negara menjadi kunci untuk mengurangi pengaruh kekayaan dalam kekuasaan (lihat Gambar 37). Langkah ini diperkuat dengan reformasi finansialisasi (lihat Gambar 38) dan desentralisasi pendapatan ekstraktif, agar pengelolaan sumber daya alam lebih transparan dan manfaatnya lebih merata bagi masyarakat.

Gambar 38. Reformasi Fiskal melalui Tata Kelola Pajak



A. Reformasi Fiskal Progresif dan Akuntabel

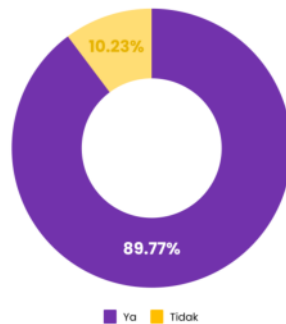
7.1. Penerapan Pajak kekayaan

Apa itu pajak kekayaan

Konsep pajak kekayaan sudah lama menjadi diskursus alternatif sebagai bentuk pungutan progresif tahunan berbasis pada total aset individu dengan pengurangan komponen kewajibannya (Yang, 2021)⁵⁴. Kolombia, Argentina, Bolivia hingga Norwegia memiliki sistem pajak kekayaan hingga hari ini. Agresivitas pajak kekayaan yang lebih menasar individu ultra-kaya dapat melengkapi sistem pajak penghasilan secara efektif (Advani et al, 2021)⁵⁵. Pajak kekayaan dikategorikan sebagai pajak progresif karena pembebanannya relatif lebih besar ditanggung oleh kelompok kaya dibanding menekan kelompok miskin dalam pajak regresif.

Hasil survei CELIOS terkait persepsi masyarakat terhadap pajak kekayaan juga mendapatkan dukungan yang tinggi. Mayoritas masyarakat setuju jika pajak kekayaan diterapkan di Indonesia.

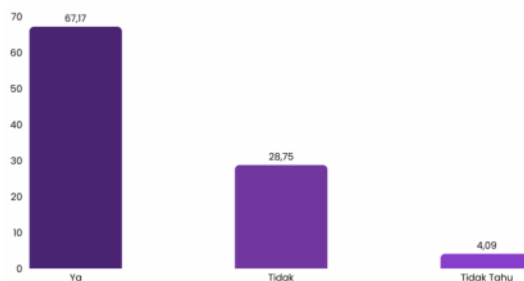
Gambar 39. Dukungan Publik terhadap Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia



Sumber: Survei Pajak Kekayaan CELIOS, 2025

Mayoritas responden juga percaya bahwa pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antar kelas masyarakat. Penerimaan pajak akan bertambah signifikan, artinya pemerintah dapat menaikkan anggaran belanja untuk fungsi perlindungan sosial tanpa menaikkan tarif pajak yang sudah berlaku. Disaat krisis, pajak kekayaan juga dapat menjadi shock absorber bagi fiskal (lihat Gambar 39).

Gambar 40. Persepsi Publik terhadap Dampak Pajak Kekayaan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

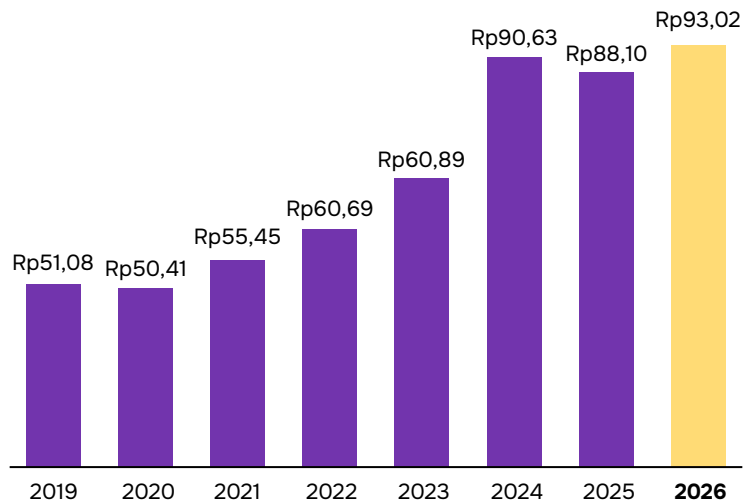


Sumber: Survei Pajak Kekayaan CELIOS, 2025

Pajak kekayaan 2% atas 50 orang terkaya bisa menghasilkan Rp93 triliun per tahun bagi negara

Potensi pajak kekayaan bisa lebih optimal dengan threshold atau batas minimal pengenaan pajak kekayaan Rp84 miliar. Dengan tarif progresif 1-2%, potensi pajak kekayaan bisa mencapai Rp142,2 triliun per tahun (lihat Tabel 5). Di tengah ketimpangan yang makin lebar, negara sebenarnya punya ruang untuk menarik kontribusi lebih besar dari kelompok paling atas, bukan dari masyarakat biasa yang sudah terbebani.

Gambar 41. Potensi Pajak Kekayaan 50 Triliuner (2019-2026)



Sumber: Data Forbes 50 orang terkaya 2026, diolah oleh peneliti

Tabel 5. Simulasi Pajak Kekayaan Berdasarkan Ambang Batas Kekayaan

Kelompok Kekayaan	Pengenaan Tarif (%)	Jumlah Milyarder	Potensi Penerimaan (Miliar Rp)
< Rp. 84 m	0	12.910	0
Rp. 84–506 m	1	11.180	6.093
> Rp. 506 m	2	1.729	136.112
Total Potensi Pajak Kekayaan			142.205

Sumber : Global Wealth Tax Simulator (2026), diolah CELIOS⁵⁶

Gambar 42.**Pajak Kekayaan Pejabat Eksekutif dan Legislatif**

Anggota DPD RI		
Jumlah Kekayaan > Rp. 506 Miliar		-
Jumlah Kekayaan > Rp. 84 Miliar	Rp	885.781.517.824
Potensi Pajak Kekayaan	Rp	8.857.815.178
Anggota DPR RI		
Jumlah Kekayaan > Rp. 506 Miliar	Rp	7.094.104.754.648
Jumlah Kekayaan > Rp. 84 Miliar	Rp	9.074.180.974.818
Potensi Pajak Kekayaan	Rp	232.623.904.841
Pejabat Kabinet Merah Putih		
Jumlah Kekayaan > Rp. 506 Miliar	Rp	22.893.474.942.200
Jumlah Kekayaan > Rp. 84 Miliar	Rp	5.296.566.823.295
Potensi Pajak Kekayaan	Rp	510.835.167.077
Pejabat Eksekutif & Legislatif		
Jumlah Kekayaan > Rp. 506 Miliar	Rp	29.987.579.696.848
Jumlah Kekayaan > Rp. 84 Miliar	Rp	15.256.529.315.937
Potensi Pajak Kekayaan	Rp	752.316.887.096

Sumber: Data Forbes 50 orang terkaya 2026, diolah oleh peneliti



Pajak kekayaan untuk seluruh orang superkaya bisa menghasilkan **Rp142,2 triliun** per tahun, hampir **60% dari total pajak penghasilan** yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia

7.2. Penerapan *Tax Benefit* untuk Mendukung Ekonomi Kelas Menengah

Salah satu pendekatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi adalah melalui skema *tax benefit*, yaitu kebijakan pajak yang tidak hanya menarik penerimaan, tetapi juga secara aktif pendistribusian kembali pendapatan. Prinsipnya, kelompok berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar, sementara kelompok menengah rentan dan berpenghasilan rendah menerima manfaat langsung, baik dalam bentuk pengurangan pajak maupun transfer tunai. Skema ini bisa dirancang melalui pajak progresif, pajak kekayaan, serta kredit pajak (*tax credit*) yang dapat dikembalikan (*refundable*), sehingga meskipun seseorang tidak memiliki kewajiban pajak besar, mereka tetap bisa menerima manfaat finansial dari negara (lihat Gambar 43).

Dalam praktiknya, skema ini dapat diterapkan secara konkret dengan memberikan *tax return* dalam bentuk cash kepada kelompok seperti guru, PNS golongan bawah, pekerja formal dengan gaji rendah, serta kelas menengah rentan. Misalnya, setelah pelaporan pajak tahunan, individu dalam kelompok ini menerima pengembalian pajak langsung ke rekening mereka sebagai tambahan pendapatan. Mekanisme ini mirip dengan *earned income tax credit* di beberapa negara, di mana negara “menambah” penghasilan kelompok pekerja tertentu melalui sistem pajak. Di sisi lain, pembiayaan skema ini berasal dari peningkatan pajak pada kelompok superkaya (*ultra-rich*) dan pemilik aset besar, sehingga terjadi redistribusi yang nyata dari atas ke bawah.

Dampaknya bersifat langsung dan terasa. Pertama, daya beli kelompok menengah bawah meningkat karena mereka menerima tambahan pendapatan tunai. Kedua, ketimpangan berkurang karena sistem pajak tidak lagi netral, tetapi aktif mengoreksi distribusi pendapatan. Ketiga, kebijakan ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pajak, karena masyarakat melihat manfaat yang konkret, bukan hanya kewajiban membayar.

Kampanye Pajak Kekayaan



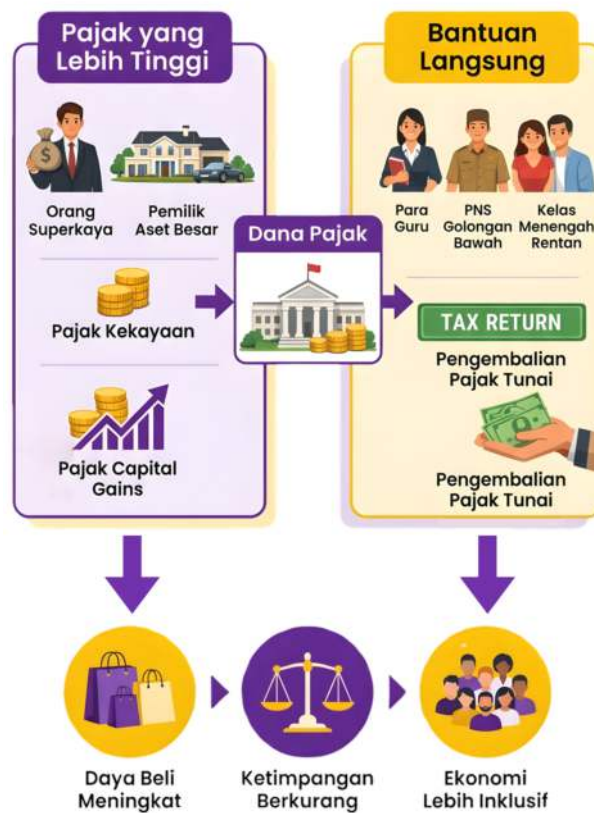
Pajak kekayaan itu bukan memajaki semua orang, hanya untuk mereka yang superkaya, dengan harta di atas Rp84 miliar

Pajak kekayaan bukan ancaman bagi ekonomi, melainkan ujian keberanian politik. Apakah negara berpihak pada segelintir superkaya atau pada keadilan bagi ratusan juta warganya? Kami mengajak semua pihak untuk terlibat melalui Website pajakkekayaan.com, bersama mendorong Rancangan Undang Undang Pajak Kekayaan, dan memperluas Buku Saku Pajak Kekayaan. Kampanye ini menantang ketimpangan secara terang-terangan dan memperjuangkannya hadirnya pajak kekayaan di Indonesia

Berikut Barcode Buku saku Pajak Kekayaan:



Gambar 43. Skema *Tax Benefit* untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi



Sumber: Analisis Peneliti

7.3. Menghapus Pajak yang Membebani Kelas Menengah Bawah

Salah satu langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan adalah menghapus atau mengurangi pajak yang justru membebani kelas menengah bawah, terutama pada momen-momen krusial seperti kehilangan pekerjaan atau masa pensiun. Pajak atas pesangon, misalnya, secara substansi tidak adil karena dikenakan pada individu yang sedang mengalami transisi ekonomi dan kehilangan sumber penghasilan tetap. Hal yang sama berlaku pada pajak pensiun yang memotong pendapatan kelompok lansia yang sudah tidak produktif secara ekonomi. Selain itu, pengurangan PPN untuk barang kebutuhan dasar (atau bahkan pembebasan untuk beberapa kategori) akan langsung menurunkan biaya hidup masyarakat luas. Di tingkat daerah, penghapusan pungutan tidak jelas, seperti retribusi informal, biaya administrasi berlapis, atau pungutan layanan publik yang tidak transparan juga penting untuk mengurangi beban ekonomi harian masyarakat kecil.

7.4. Transparansi Data Pajak Individu di Indonesia

Gagasan transparansi pajak individu seperti di beberapa negara seperti di Eropa berangkat dari kebutuhan memperkuat akuntabilitas publik dan kepatuhan pajak. Di negara seperti Norwegia dan Swedia, data pajak individu dapat diakses publik, dan penelitian menunjukkan bahwa transparansi ini berkorelasi dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi serta tax morale yang kuat. Sebaliknya, di Indonesia, data perpajakan tidak bisa diakses dan membatasi kontrol publik terhadap elite.

Rekomendasi kebijakan yang paling mudah dilakukan adalah mendorong transparansi data pajak. Pemerintah dapat mewajibkan publikasi agregat pajak para triliuner 10 persen teratas serta pejabat publik tinggi (presiden, wakil presiden seperti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta menteri) dalam bentuk rasio pajak terhadap kekayaan atau penghasilan. Transparansi pajak juga bisa dilakukan pada seluruh masyarakat, dengan tetap melindungi data yang bersifat pribadi. Dengan kombinasi transparansi elite dan reformasi struktur pajak, kepercayaan publik bisa meningkat sekaligus mengurangi tekanan berlebih pada kelas menengah-bawah.

“

Ketika data pajak di Finlandia dipublikasikan, orang-orang dengan gaji lebih rendah bertanya, 'Mengapa rekan kerja saya dibayar lebih tinggi?' Hal ini berdampak pada meningkatnya upah.

Tuomo Pietilainen,
jurnalis Helsingin Sanomat, Finlandia

B. Memutus Siklus: Ketika Oligarki Menentukan Aturan

7.5. Partai Politik Dibiayai Publik

Salah satu solusi struktural untuk mengurangi ketimpangan ekonomi adalah dengan membiayai partai politik secara publik sekaligus membuka ruang pembiayaan dari masyarakat luas (lihat Gambar 44). Skema ini bertujuan memutus ketergantungan partai terhadap oligarki dan pemilik modal besar, yang selama ini muncul akibat tingginya biaya politik. Melalui pembiayaan publik dari APBN yang transparan, berbasis perolehan suara, dan diaudit ketat serta dilengkapi donasi kecil dari masyarakat (*crowdfunding* politik), partai memiliki sumber dana yang lebih sehat dan terdiversifikasi. Seluruh pendanaan, baik dari negara, individu, maupun badan usaha, juga harus dilaporkan secara terbuka dan *real-time* agar potensi konflik kepentingan dapat diawasi publik.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan pendekatan ini efektif menjaga integritas politik. Di Jerman, negara-negara Nordik, dan Kanada, pembiayaan publik yang kuat, transparansi tinggi, serta pembatasan sumbangan berhasil mengurangi dominasi donor besar dan memperkuat partisipasi warga. *Move Forward Party* yang saat ini berubah nama menjadi *People's Party* di Thailand memiliki mekanisme *crowdfunding* (lihat Gambar 45) di level *grassroot* yang cukup besar. Pemanfaatan platform digital untuk mencari pendanaan dari konstituen membuat transparansi partai meningkat. Kebijakan yang dikampanyekan *Move Forward Party* pada 2023 merefleksikan hubungan erat antara sumbangan dari masyarakat langsung dan platform politik.

Fenomena Zohran Mamdani sebagai walikota New York memberikan pelajaran penting. Pendanaan politik Zohran berasal dari sumbangan kecil, dalam satu penggalangan dana kampanye berhasil memperoleh US\$844.000 setara Rp13 miliar (dari 11.000 donor). Hal yang sama sebelumnya dipraktikkan Alexandria Ocasio-Cortez, anggota parlemen di AS dengan total 70% dana kampanye berasal dari sumbangan dibawah US\$200 per orang.

Jika diterapkan di Indonesia, model ini berpotensi menekan politik biaya tinggi, memperluas keterlibatan publik, dan mendorong kompetisi yang lebih adil berbasis gagasan. Dalam jangka panjang, partai akan lebih akuntabel kepada masyarakat luas, bukan kepada segelintir elite, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan mayoritas dan membantu memutus hubungan erat antara kekayaan dan kekuasaan.

Gambar 44.

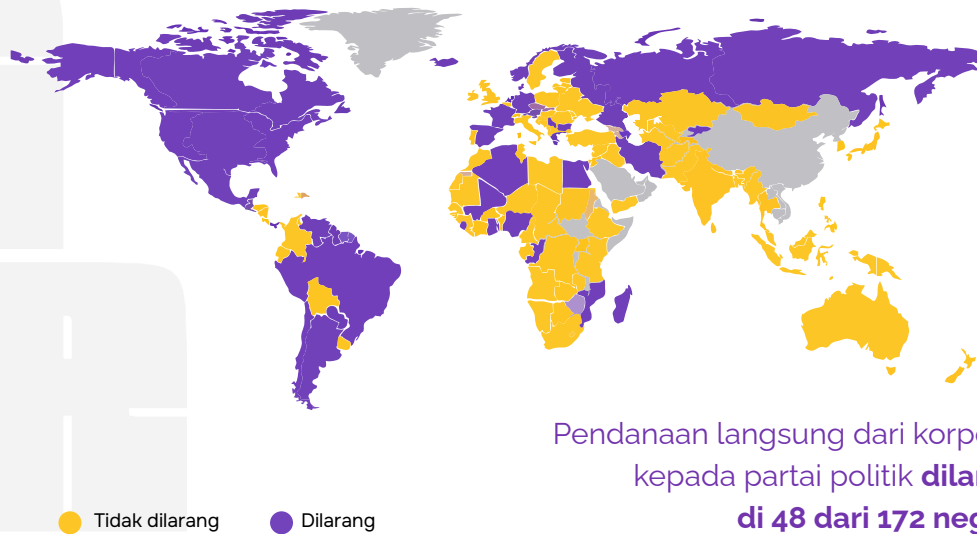
Alur Pengesahan Aturan Pembiayaan Publik Partai Politik



Sumber: Diolah oleh peneliti

Gambar 45.

Donasi Korporasi ke Partai Politik



Pendanaan langsung dari korporasi kepada partai politik **dilarang di 48 dari 172 negara.**

Sumber: The International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Gambar 45 memperlihatkan tren global dimana banyak negara mulai membatasi bahkan melarang donasi korporasi ke partai politik karena dianggap merusak independensi kebijakan publik. Logikanya sederhana, ketika perusahaan bisa membiayai politik, maka kebijakan berpotensi menjadi “balas jasa”. Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan arah yang lebih tegas: di beberapa yurisdiksi Australia, donasi politik mulai digantikan dengan pendanaan publik.

Saat ini Indonesia masih mengizinkan donasi korporasi (berwarna ungu). Dengan biaya politik yang sangat mahal dan sistem dua periode, politisi memiliki keinginan kuat untuk bergantung pada pendanaan dari elite ekonomi. Di sinilah oligarki masuk dan mendapatkan pengaruh terhadap arah kebijakan, sementara transparansi yang lemah membuat hubungan ini sulit diawasi publik.

7.6. Reset Ulang Skema Bagi Hasil Daerah Lewat Mekanisme Dividen Sosial

Daerah penghasil menanggung dampak lingkungan dan sosial tetapi tidak menikmati hasil, mencerminkan “*resource curse*” dalam desentralisasi semu. Karena itu, diperlukan desentralisasi penuh pendapatan ekstraktif agar daerah dapat mengelola hasilnya sendiri dan mendorong pembangunan yang lebih adil.

Kasus daerah penghasil SDA seperti Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang mengalami pemangkasan anggaran dana bagi hasil daerah untuk resentralisasi fiskal menimbulkan gangguan pembangunan daerah secara signifikan. Daerah terpaksa berhemat ketika DBH (Dana Bagi Hasil) alami pemangkasan dengan dalih realokasi ke program nasional (salah satunya MBG). Ketidakadilan hubungan pusat-daerah tidak bisa dibenahi melalui UU HKPD (Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah) tahun 2022. Diperlukan reformasi struktural dalam bentuk skema baru yang lebih berorientasi pada kesejahteraan daerah.

Pendapatan tersebut dapat dikelola melalui skema dividen sosial daerah, dengan alokasi untuk pembangunan publik, dana abadi, dan transfer langsung ke warga. Untuk memutus monopoli elite, kepemilikan perlu didemokratisasi melalui skema publik, komunitas, dan pekerja, serta didukung reformasi regulasi dan transparansi. Meski ada risiko seperti elite capture lokal, ketimpangan antar daerah, dan ketergantungan ekonomi, pendekatan ini tetap bisa mendorong redistribusi yang lebih adil, membuka akses kepemilikan kapital, dan memperkuat desentralisasi fiskal.

Contoh penerapan dividen sosial

Saat ini, terjadi booming industri nikel di Sulawesi, yang didorong oleh kebutuhan global akan baterai kendaraan listrik, menciptakan lonjakan investasi dan produksi bernilai besar. Selama ini, penerimaan negara dari sektor nikel (royalti dan PNBPN) terlebih dahulu dikumpulkan ke pemerintah pusat, lalu dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan porsi terbatas dan tidak selalu sebanding dengan yang dikirim ke pusat. Di Sulawesi Tengah, misalnya, daerah hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per tahun, padahal nilai investasi sektor nikel 127 triliun pada tahun 2025. Dalam skema social dividend, rantai ini diputus, keuntungan dari nikel tidak lagi “naik ke pusat lalu turun kembali secara terbatas”, tetapi langsung dikumpulkan dalam dana bersama, seperti Alaska Permanent Fund di Alaska, dan didistribusikan ke warga sebagai dividen tunai (uang) atau layanan publik. Jadi, masyarakat menjadi penerima langsung dari kekayaan yang dihasilkan di wilayah mereka sendiri. Skema ini bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan ekstraktif lainnya di Indonesia

7.7. Audit Anggaran Negara

Dalam konteks anggaran negara, isu kunci yang perlu didorong adalah transparansi: masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran negara tersebut digunakan. Tanpa transparansi, utang publik berisiko masuk ke dalam siklus oligarki, di mana pembiayaan negara justru mengalir ke proyek-proyek yang menguntungkan perusahaan besar yang dekat dengan kekuasaan, bukan untuk kepentingan publik. Akibatnya, anggaran yang seharusnya mendukung layanan dasar, perlindungan sosial, dan pembangunan berkelanjutan justru memperkuat konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada segelintir elite.

Citizens' Budget Audit menjadi penting sebagai alat untuk membongkar aliran anggaran negara, memastikan akuntabilitas, dan mendorong agar utang benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkuat lingkaran oligarki. Skema *Citizens' Budget Audit* dapat berbentuk platform dengan dukungan pembiayaan publik sehingga partisipatif dan dimiliki oleh seluruh masyarakat.

Filipina menjadi negara yang menerapkan *Citizen Participatory Audit* (CPA) sehingga memungkinkan warga menjadi anggota tim audit bersama auditor resmi dari *Commission on Audit* (COA). Peran masyarakat hadir di seluruh tahapan audit bukan hanya sebagai penonton tapi sebagai auditor aktif. Negara yang mempelopori *Citizens' Budget Audit* adalah Brasil dengan pelopor *participatory budgeting* sejak 1989 di Porto Alegre. *Participatory budgeting* telah diterapkan di lebih dari 11.500 proses keuangan pemerintah di tingkat kota/kabupaten per 2024.



Di negeri yang kaya, seorang anak kehilangan harapan hanya karena tak punya Rp10.000 untuk belajar. Selama sumber daya dirampas oligarki, kebijakan negara hanya menguntungkan segelintir orang, tragedi nahas ini akan terus berulang.

Kerjas ti mama Reti
mama Jao zee
mama molo Jao
Jalo mata mae
nee rita ee mama

Mama Jao Galomata
ma hoo rita nee
Galngao e-c



Surat Buat Mama Reti

Mama saya pergi dulu

Mama relakan saya pergi (meninggal)

Jangan menangis ya Mama

Mama saya pergi (meninggal)

Tidak perlu Mama menangis dan mencari
atau merindukan saya

Selamat tinggal, Mama

Sepucuk surat Anak SD kelas IV di NTT yang masih berusia 10 tahun yang diduga putus asa dengan keadaan yang dia alami, setelah ibunya tidak mampu memenuhi permintaan untuk membelikan buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000.

Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tidak seharusnya ada satu pun anak yang harus menghadapi keadaan seperti ini. Kisah ananda adalah pengingat bagi kita semua untuk terus berjuang, agar tidak ada lagi anak yang merasa sendirian hanya karena keterbatasan. Ketimpangan di Indonesia itu nyata, dan keadilan kesejahteraan hanya bisa diperjuangkan lewat kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Referensi

- ¹Metode estimasi disertakan dalam lampiran metodologi
- ²Wright, M. (1956). *The Power Elite. Classes and Elites in Democracy and Democratization*.
<https://doi.org/10.4324/9780429499821-16>.
- ³Lindblom, Charles E. 1982. "The market as prison." *The Journal of Politics* 44(2): 324–336.
- ⁴Winters, Jeffrey. 2011. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ⁵Fairfield, Tasha. 2015. *Private Wealth and Public Revenue in Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- ⁶Bussemeyer, Marius R., and Thelen, Kathleen. 2020. "Institutional Sources of Business Power." *World Politics* 72(3): 448–480.
- ⁷Bogliaccini JA, Madariaga A. The discreet charm of the oligarchy: conceptualizing material power and opportunity hoarding. *Business and Politics*. 2024;26(4):684-705. doi:10.1017/bap.2024.34
- ⁸Uraian metodologi secara komprehensif disajikan dalam bagian lampiran.
- ⁹Elite capture adalah kondisi ketika kelompok kecil yang memiliki kekuasaan atau elite (baik secara ekonomi, politik, atau sosial) menguasai atau mengarahkan kebijakan dan sumber daya, untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok/golongan, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.
- ¹⁰Putra, N. (2025, Agustus 15). Prabowo: Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen hanya dirasakan segelintir orang. *Tempo*.<https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-pertumbuhan-ekonomi-di-atas-5-persen-hanya-dirasakan-segelintir-orang-2059137>
- ¹¹Fatah, N., Bayz, H., Yaqub, K., Kareem, L., Ahamd, K., Hussein, H., Salih, A., & Aivas, S. (2025). Beyond economic growth: neo-liberalism, alternative theories, and the future of economic development. *British Journal of Interdisciplinary Research*. <https://doi.org/10.31039/bjirv2i4.24>
- ¹²Redistribusi ekonomi adalah upaya mendistribusikan kembali kekayaan dari masyarakat superkaya ke kurang mampu, bertujuan meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi.
- ¹³Claveria, O., & Sorić, P. (2023). Inequality and redistribution: evidence from Scandinavian and Mediterranean countries. *Applied Economic Analysis*. <https://doi.org/10.1108/aea-06-2023-0201>.
- ¹⁴CAGR: Compound Annual Growth Rate (Rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan)
- ¹⁵Nilai tukar berdasarkan JISDOR (10 Maret 2026) dengan 1 USD setara IDR16.879
- ¹⁶Nuswantoro. (2025, December 7). Bencana Sumatera bukan faktor cuaca semata. *Mongabay Indonesia*.
<https://mongabay.co.id/2025/12/07/bencana-sumatera-bukan-faktor-cuaca-semata/>
- ¹⁷Tribun Medan. (2026). Prabowo klaim tak ada lagi pengungsi di tenda, Irma menangis ditanya anaknya "sampai kapan di sini?". *Tribunnews*. <https://medan.tribunnews.com/news/1786846/prabowo-klaim-tak-ada-lagi-pengungsi-di-tenda-irma-menangis-ditanya-anaknya-sampai-kapan-di-sini>
- ¹⁸Grafik menampilkan individu/keluarga dengan kekayaan bersih (net worth) tertinggi di masing-masing negara. Dalam rangka menjaga komparabilitas dan menghindari distorsi data, Amerika Serikat tidak ditampilkan karena posisinya sebagai outlier ekstrem dalam distribusi kekayaan global.
- ¹⁹Data yang digunakan berdasar pelaporan LHKPN terkini dimana sebagian besar pejabat publik terakhir melaporkan data kekayaannya tahun 2024.
- ²⁰Elite consolidation adalah kelompok elite (ekonomi, politik, atau sosial) semakin terpusat, saling terhubung, dan memperkuat kekuasaan serta kekayaan mereka dalam satu jaringan yang sama.
- ²¹Metode estimasi dijelaskan dalam bab metodologi.
- ²²Temuan ini berasal dari working paper berjudul "Beyond Averages: Explaining the Wage Gap Between Generation Z and Older Workers in Indonesia" yang ditulis oleh tim penulis Studi Ketimpangan Ekonomi Indonesia; untuk diskusi lebih lanjut, silakan menghubungi tim penulis.
- ²³Abidoye, R., Puspitasari, G., Sunindijo, R., & Adabre, M. (2020). Young adults and homeownership in Jakarta, Indonesia. *International Journal of Housing Markets and Analysis*. <https://doi.org/10.1108/ijhma-03-2020-0030>

- ²⁴Gentili, M., & Hoekstra, J. (2021). Homeownership out of reach? Intergenerational transfers and homeownership reproduction in middle class families in Rome, Italy. *Cities*, 116, 103277. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103277>
- ²⁵Maroto, M., & Severson, M. (2020). Owning, renting, or living with parents? Changing housing situations among Canadian young adults, 2001 to 2011. *Housing Studies*, 35, 679 - 702. <https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1630559>
- ²⁶Lennartz, C., & Helbrecht, I. (2018). The housing careers of younger adults and intergenerational support in Germany's 'society of renters'. *Housing Studies*, 33, 317 - 336. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1338674>
- ²⁷Flynn, L., & Kosteci, S. (2023). Acquisition capital: using a new concept to explore housing outcomes among millennials in the United States. *Housing Studies*, 39, 3007 - 3028. <https://doi.org/10.1080/02673037.2023.2241841>
- ²⁸Filandri, M., & Bertolini, S. (2016). Young people and home ownership in Europe. *International Journal of Housing Policy*, 16, 144 - 164. <https://doi.org/10.1080/14616718.2015.1130606>
- ²⁹Dewilde, C., & Flynn, L. (2021). Post-crisis developments in young adults' housing wealth. *Journal of European Social Policy*, 31, 580 - 596. <https://doi.org/10.1177/09589287211040443>
- ³⁰Rumah subsidi 2025: <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/rumah-subsidi-adalah>
- ³¹Ramadhanty, N. (2026). Nasib Pekerja Gig: Fleksibel Tapi Minim Perlindungan Hukum. *Tirto.id*. <https://tirto.id/nasib-pekerja-gig-fleksibel-tapi-minim-perlindungan-hukum-htWi>
- ³²Idem
- ³³Pandita, G. (2025). Oligarchy, Crony Capitalism, and Democracy: An Analysis of Power. *International Journal on Science and Technology*. <https://doi.org/10.71097/ijst.v16.i1.1557>
- ³⁴Bogliaccini, J., & Madariaga, A. (2024). The discreet charm of the oligarchy: conceptualizing material power and opportunity hoarding. *Business and Politics*. <https://doi.org/10.1017/bap.2024.34>
- ³⁵Guerrero, D. (2021). Systemic corruption: Constitutional ideas for an anti-oligarchic republic. *Contemporary Political Theory*, 21, 31 - 33. <https://doi.org/10.1080/20403313.2021.1990587>
- ³⁶Fogel, K. (2006). Oligarchic family control, social economic outcomes, and the quality of government. *Journal of International Business Studies*, 37, 603-622. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400213>
- ³⁷ibid
- ³⁸Catatan: Sesuai PP No. 36 Tahun 2021, untuk pekerja paruh waktu, pembagi yang digunakan adalah 126 (berdasarkan median jam kerja paruh waktu nasional). Rumus: Rp3.315.750 : 126, maka hasil: Rp26.315 per jam
- ³⁹Gallaway, J. H., & Bernasek, A. (2002). Gender and Informal Sector Employment in Indonesia. *Journal of Economic Issues*, 36(2), 313-321. <https://doi.org/10.1080/00213624.2002.11506473>
- ⁴⁰Partai oligarki adalah partai politik yang dikuasai dan dikendalikan oleh segelintir elite super-kaya (oligarki) yang menggunakan sumber daya materialnya untuk:
- Menguasai struktur kepemimpinan partai,
 - Menentukan proses kandidasi dan rekrutmen politik, dan
 - Mengarahkan agenda kebijakan untuk melindungi dan memperbesar kekayaan mereka
- ⁴¹Jeffrey A. Winters. "Oligarchy and Democracy in Indonesia." *Indonesia*, no. 96 (2013): 11-33. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>.
- ⁴²Hellman, Joel S. and Jones, Geraint and Kaufmann, Daniel, *Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition* (September 2000). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=240555>.
- ⁴³Vedi R. Hadiz, and Richard Robison. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power In." *Indonesia*, no. 96 (2013): 35-57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>.
- ⁴⁴ACLC KPK (2023), "Biaya dan Mahar Politik Memicu Korupsi". <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230904-biaya-dan-mahar-politik-memicu-korupsi>
- ⁴⁵Penjelasan lebih lanjut terkait penghitungan biaya politik tersedia di bagian metodologi
- ⁴⁶Kurniati, Dian (2020), "Tarif PPh Badan 22%, Menkeu: Korporasi Dapat Keringanan Rp20 Triliun", *DDTC News*, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/20966/tarif-pph-badan-22-menkeu-korporasi-dapat-keringanan-rp20-triliun>.
- ⁴⁷Tempo (2025), "Kilas Balik Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto: Kerugian Negara Rp 2,3 Triliun", <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-kasus-korupsi-e-ktp-setya-novanto-kerugian-negara-rp-2-3-triliun-2061316>
- ⁴⁸BBC Indonesia (2025), Mengapa pemerintah berubah sikap soal PPN 12%?,

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c33dymdvv67o>

⁴⁹CELIOS (2024), “10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo”, <https://celios.co.id/challenges-in-economic-recovery-under-the-prabowo-gibran-administration-10-fiscal-pitfalls-from-jokowis-legacy/>

⁵⁰Tempo (2025), Penyebab PSN Digugat ke Mahkamah Konstitusi, <https://www.tempo.co/politik/penyebab-psn-digugat-ke-mahkamah-konstitusi-1965802>

⁵¹BPS (2025), “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2024”, KPU. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU3MyMx/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2024.html>

⁵² <https://www.bisnis.com/read/20240824/638/1793690/viral-segini-harta-kekayaan-kaesang-dan-erina-gudono>

⁵³ <https://www.forbes.com/profile/hary-tanoesoedibjo/>

⁵⁴Yang, X. (2021). Changes in the distribution of after-tax wealth: Will wealth tax improve the wealth distribution inequality in the United States? <https://doi.org/10.2139/ssrn.3806950>

⁵⁵Advani, A., Miller, H., & Summers, A. (2021). Taxes on wealth: Time for another look? *Fiscal Studies*, 42(3–4), 389–395. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12289>

⁵⁶World Inequality Report (2026), “Global Wealth Tax Simulator”. <https://wid.world/world-wealth-tax-simulator/>.
Kemudian dikonversikan berbasis Kurs JISDOR Bank Indonesia per 10 Maret 2026 (Rp16.879/USD)

REPUBLIK OLIGARKI

KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA 2026



Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)
Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id